Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

LKj

Kabupaten Bantul Tahun 2014

Kabupaten Bantul
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015

Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bantul.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Bantul, 20 Maret 2015

Inspektur Kabupaten Bantul

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH
NIP. 19710506 199603 1 003

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2014.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015, sehingga Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pun dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Untuk itu laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan lebih akuntabel, meningkatkan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, melaksanakan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan menegakkan hukum baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2014, khususnya Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB serta Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 23 Maret 2015

Bupati Bantul,

Hj. SRI SURYA WIDATI

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2014 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul sejak tahun 2011 berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang pada tahun 2014 menginjak tahun ke-3, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2011 – 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan tahun 2014, disesuaikan dengan perubahan atas RPJMD. Dalam menetapkan IKU tersebut mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 16 (enam belas) indikator atau sebanyak 89,89% berkriteria **Sangat Baik**, 1 (satu) indikator atau 5,56% berkategori **Tinggi** dan 1 (satu) indikator atau 5,56% tercapai dengan kategori **Rendah**. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan perlu mendapatkan perhatian pada tahun berikutnya.

Untuk 16 (enam belas) IKU yang pencapaiannya masuk kriteria Sangat Baik, yaitu indikator yang pencapaiannya ≥ 90,1% meliputi:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Opini pemeriksaan BPK
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Persentase Gizi Buruk
6. Usia Harapan Hidup
7. Angka melek huruf
8. Rata-rata lama sekolah
9. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
10. Indeks Gini
11. Tingkat Ketersediaan Energi
12. Tingkat ketersediaan Protein
13. Persentase peningkatan jumlah wisatawan
14. Angka pengangguran
15. Persentase jumlah penduduk miskin

16. Persentase Desa Tangguh

Selanjutnya IKU yang mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 9 (sembilan) IKU, mencakup :

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Persentase Gizi Buruk
4. Usia Harapan Hidup
5. Angka melek huruf
6. Tingkat Ketersediaan Energi
7. Tingkat ketersediaan Protein
8. Persentase peningkatan jumlah wisatawan
9. Angka pengangguran

Sedangkan IKU yang masuk kriteria **Tinggi** adalah IKU "Angka Kematian Bayi" yang tercapai 83,33% dari target yang ditetapkan dan IKU yang masuk kriteria **Rendah** yaitu IKU "Angka Kematian Ibu" yang realisasinya mencapai 60,40% dari target yang ditetapkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya upaya yang lebih serius untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal *teamwork* yang solid serta *response time* yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bantul ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Selain permasalahan seperti tersebut diatas, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Jumlah Penduduk Miskin masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Peran Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Peran pemerintah lainnya mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok- kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah

DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan, meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja , hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu ii
Kata Pengantar iii
Ikhtisar Eksekutif v
Daftar Isi ix
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xv
BAB I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Demografi 2
1. Jumlah Penduduk 2
2. Indeks Pembangunan Manusia 4
3. Penduduk Miskin 4
C. Kondisi Ekonomi Daerah 5
D. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul 7
E. Isu Strategis 8
BAB II Perencanaan Kinerja 13
A. Rencana Strategis 13

1. Visi dan Misi ____ 13
2. Tujuan dan Sasaran ____ 14
3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas ____ 20
B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 ____ 22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran ____ 23
BAB III Akuntabilitas Kinerja ____ 25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 ____ 26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ____ 28
1. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah ____ 28
2. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ____ 34
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ____ 37
4. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ____ 40
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ____ 50
6. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan ____ 55
7. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah ____ 61
8. Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata ____ 64
9. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran ____ 67
10. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin ____ 71
11. Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana ____ 75
C. Pencapaian Kinerja Lainnya ____ 80
1. Pencapaian Target MDGs ____ 80
2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ____ 81
3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) ____ 82
D. Akuntabilitas Anggaran ____ 83
E. Efisiensi Sumber Daya ____ 88
BAB IV Penutup ____ 90

Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2014 _____ 92

Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul _____ 94

Lampiran III Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 (Jutaan Rupiah)_____ 95

Lampiran IV Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun 2014_____ 96

Daftar Tabel

Tabel I.1	Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014*)	3
Tabel I.2	Perkembangan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2013	4
Tabel I.3	Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000) Tahun 2010-2014	5
Tabel II.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	19
Tabel II.2	Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015	20
Tabel II.3	Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014	22
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014	26
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah	28
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	35
Tabel III.5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2013	36
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	38
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	40

Tabel III.8 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 46
Tabel III.9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 46
Tabel III.10 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2014.....48
Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 50
Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan ...55
Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 61
Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata.....64
Tabel III.15 Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2014 64
Tabel III.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Paiwisata Tahun 2010 – 2014.....66
Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran.....68
Tabel III.18 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 68
Tabel III.19 umlah Penganggur Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014.....70
Tabel III.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin.....71
Tabel III.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana.....76
Tabel III.22 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul.....77
Tabel III.23 Frekuesi Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2014.....78
Tabel III.24 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2013.....81
Tabel III.25 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul.....82
Tabel II.26 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014* 83
Tabel II.27 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.....84

Tabel II.28 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2014 ...84

Tabel III.29 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2014.....88

Daftar Gambar

Gambar I.1 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014* 3

Gambar I.2 *Trend* Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008-2014 4

Gambar I.3 Pertanian sebagai Pendukung Perekonomian Kabupaten Bantul 5

Gambar I.4 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2010 – 2014 6

Gambar I.5 Kerajinan Tatah Sungging sebagai Industri Kreatif Bantul 6

Gambar I.6 PNS Menurut Pendidikan 7

Gambar I.7 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin 8

Gambar I.8 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2014 8

Gambar I.9 Olahraga Dayung 10

Gambar II.1 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 21

Gambar III.1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2014 27

Gambar III.2 Bupati Bantul, Ibu Hj. Sri Surya Widati didampingi Sekretaris Daerah, Bapak Drs. Riyantono, M.Si dalam Penerimaan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 29

Gambar III.3 LPSE Kabupaten Bantul 31

Gambar III.4 Struktur Sebaran Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet 31

Gambar III.5 Tampilan Halaman Depan Esakip Bantul 32
Gambar III.6 Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar di hadapan Bupati dan Wakil Bupati 35
Gambar III.7 Perkembangan IKM Tahun 2010-2014 38
Gambar III.8 Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagai salah satu UPP 39
Gambar III.9 *Trend* AKI Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014 41
Gambar III.10 *Trend* Angka Kematian Bayi Tahun 2010 – 2014 42
Gambar III.11 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian 42
Gambar III.12 *Trend* Gizi Buruk Tahun 2010 – 2014 43
Gambar III.13 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014 44
Gambar III.14 Manula di Bantul 44
Gambar III.15 UHH menurut Kabupaten Kota di DIY 45
Gambar III.16 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 45
Gambar III.17 Puskesmas Banguntapan Satu 47
Gambar III.18 Senam Lansia sebagai Upaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia 49
Gambar III.19 *Trend* Angka Melek Huruf Tahun 2009 - 2013 51
Gambar III.20 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2011 – 2013 51
Gambar III.21 Semangat Belajar Tak Kenal Usia 52
Gambar III.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2013 53
Gambar III.23 Keceriaan Anak Sekolah di Bantul 53
Gambar III.24 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2011 – 2013 54
Gambar III.25 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2010 – 2014 56
Gambar III.26 Peternakan Sapi di Bantul 57
Gambar III.27 Peranan Sektor Ekonomi Penyusun PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014 58
Gambar III.28 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2010- - 2014 59
Gambar III.29 Membatik 59
Gambar III.30 Trend Keluarga Sejahtera Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 60

Gambar III.31 Berbagai Lomba Kreasi Pangan B2SA Tahun 2014 62
Gambar III.32 Pantai Selatan Bantul 65
Gambar III.33 Sendang Ngembel sebagai Keselarasan Alam dan Budaya 66
Gambar III.34 Asisten Administrasi Umum dalam Pagelaran Ketoprak 67
Gambar III.35 Kegiatan Padat Karya 69
Gambar III.36 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2010 - 2015.....70
Gambar III.37 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010 – 2014 72
Gambar III.38 Perkembangan Jumlah Keluarga Miskin dan Orang Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010 -2014 72
Gambar III.39 Persentase Jiwa Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2014 73
Gambar III.40 Aktivitas Masyarakat 74
Gambar III.41 Penumbuhan Cinta Lingkungan Sejak Dini 77
Gambar III.42 Perkembangan IPM Kabupaten Bantul Tahun 2009-2013.....81

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bab I Pendahuluan berisi :

A. *Latar Belakang*
B. *Gambaran Umum Demografi*
C. *Kondisi Ekonomi Daerah*
D. *Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul*
E. *Isu Strategis*

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Gambaran Umum Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2014 menurut BPS sebanyak 968.632 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 482.805 jiwa atau sebanyak 49,81% dan perempuan sebanyak 485.827 jiwa atau sebanyak 50,19%. Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan yang berpenduduk terbanyak, yaitu 135.420 jiwa atau sebesar 13,98%, sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Srandakan paling sedikit, yaitu 29.022 jiwa atau sebesar 3%.

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif *gender* maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan proyeksi penduduk 2010-2020 sebagai berikut :

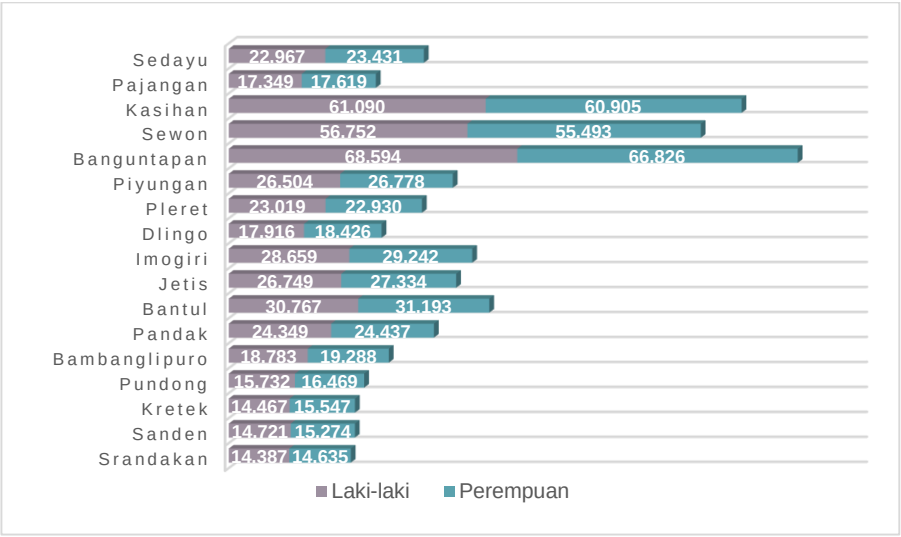

Sumber : BPD, 2015 * angka sementara

Gambar I.1 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014*

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel I.1 Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014*)

No.	Tahun	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km^2
1	2010	506,85	911.503	1.798
2	2011	506,85	921.263	1.818
3	2012	506,85	930.276	1.835
4	2013	506,85	955.015	1.884
5	2014*)	506,85	968.632	1.911

Sumber : BPS, 2011-2015 *) Proyeksi penduduk 2010-2020

2. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 73,75 pada tahun 2009 hingga 76,01 pada tahun 2013. Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul naik sebesar 2,26 poin sedangkan dalam setahun terakhir meningkat sebesar 0,5 poin.

Tabel I.2 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2013

Indeks	Nilai			Pertumbuhan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Harapan Hidup	77,22	77,23	77,70	0,04	0,01	0,61
Pendidikan	80,64	81,35	81,91	0,45	0,88	0,69
Pendapatan	67,29	67,96	68,42	1,77	1,00	0,68
IPM	75,05	75,51	76,01	0,70	0,61	0,66

Sumber : BPS, 2014

3. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul tahun 2014 sebanyak 113.863 orang atau sebesar 12,41% dari seluruh penduduk Bantul. Jumlah penduduk miskin di Bantul mengalami penurunan sebesar 1,07 poin dari tahun 2013 yang banyaknya sebesar 13,48%. Dari tahun 2010 sampai tahun 2014 penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebesar 2,96 poin.

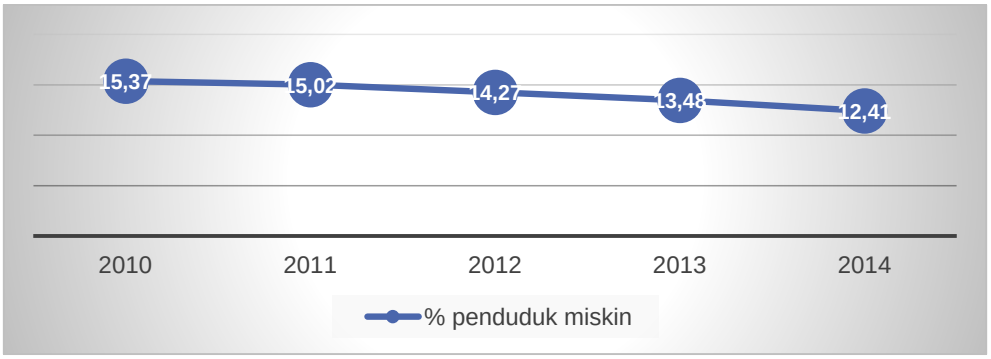

Sumber : BKKPPKB, 2015

Gambar I.2 *Trend* Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008-2014

C. Kondisi Ekonomi Daerah

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2014 mampu tumbuh 5,44% dan menghasilkan nilai PDRB atas harga berlaku sebesar 14,27 trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 4,89%. Capaian kondisi tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun dengan tahun 2013 sebesar 5,57%, namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01% dan DIY sebesar 5,2% serta memberikan kontribusi terhadap stabilitas pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 5% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan positif namun sebagian besar mengalami perlambatan.

Tabel I.3 Perkembangan PDRB Per Kapita
(Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000) Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2000	
		Nilai (Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Rp)	Pertumbuhan
1	2010	9.926.984	9,57	4.353.170	**3,57**
2	2011	10.882.566	9,63	4.543.555	**4,37**
3	2012	11.941.771	9,73	4.741.942	**4,37**
4	2013*)	13.329.466	11,62	4.950.248	**4,39**
5	**2014**)**	**14.737.856**	**10,57**	**5.056.693**	**2,15**

Sumber : BPS, 2015

PDRB per kapita ADHK Kabupaten Bantul pada tahun 2014 mencapai 14,74 juta rupiah meningkat 48,46% dari capaian tahun 2010 sebesar 9,93 juta rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan produktivitas perekonomian masyarakat semakin membaik

Gambar I.3 Pertanian sebagai Pendukung Perekonomian Kabupaten Bantul

Kondisi perekonomian Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2014 ditandai dengan terjadinya transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, **sektor primer** yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, **sektor sekunder** yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) listrik, gas, dan air bersih; dan (3) bangunan. Ketiga, **sektor tersier** yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan, hotel, dan restoran; (2) pengangkutan dan komunikasi; (3) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan (4) jasa-jasa. Peran sektor primer dan sekunder mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah sektor tersier

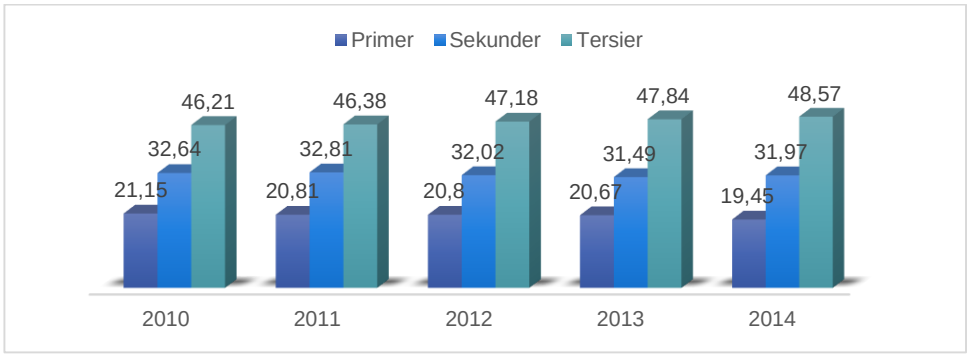

Sumber : Bappeda, 2015 (data diolah)

Gambar I.4 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2010 – 2014

Perkembangan sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa sektor primer memberikan peranan sebesar 19,45%, sektor sekunder 31,97% dan sektor tersier sebesar 48,57%.

Gambar I.5 Kerajinan Tatah Sungging sebagai Industri Kreatif Bantul

D. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Bantul per 31 Desember 2014 sebanyak 10.971 orang, terdiri dari 5.090 orang atau 46,40% Laki-laki dan 5.881 orang atau 53,60% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 51,95% atau 5.699 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 19,59% atau 2.333 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

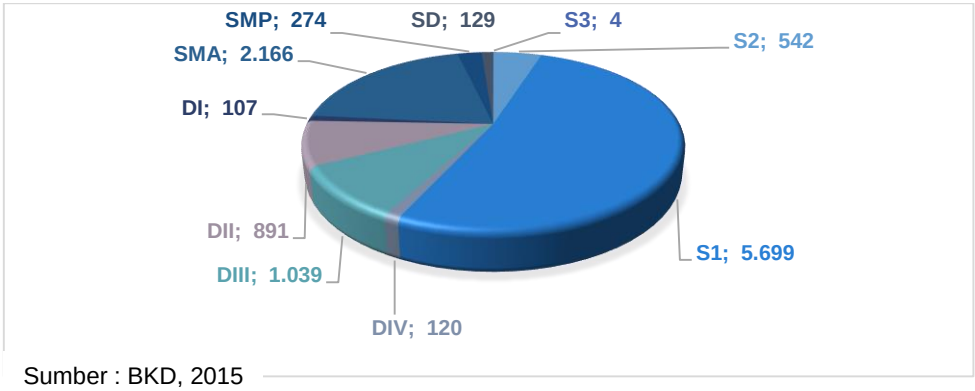

Sumber : BKD, 2015

Gambar I.6 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).

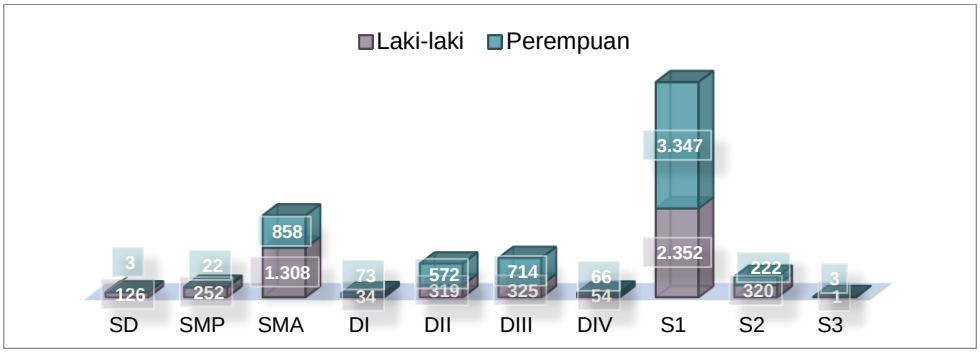

Sumber : BKD, 2015

Gambar I.7 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

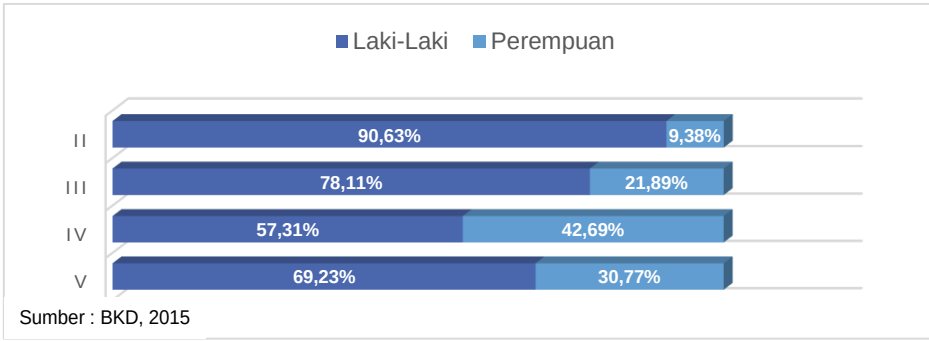

Sumber : BKD, 2015

Gambar I.8 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2014

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

   Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

3. Kemiskinan

   Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bantul yang masih rendah di banding dengan rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

4. Pengangguran

   Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya.

   Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

5. Pendidikan untuk kemajuan dan peningkatan moralitas

   Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

   Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang

artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

6. Pelayanan Kesehatan

Sebagian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status gizi masyarakat, endemi demam berdarah, flu burung dan chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

Gambar I.9 Olahraga Dayung

7. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kesenian, tradisi, pariwisata, olahraga dan pemuda jika dapat berkembang dengan baik akan merupakan potensi yang dapat dieksploitasi profitabilitas maupun benefiditasnya. Evolusi budaya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pewarisan seni tradisi (transfer knowledge). Sebagai

kebanggaan atas warisan leluhur, kecintaan terhadap tanah air (lokal genius), maka rantai yang hilang dalam setiap generasi pewarisan seharusnya diminimalisir. Daya tarik pariwisata terdapat pada sisi keunikan/kekhasan, keunggulan budaya, dan pelayanan dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Daya dukung sektor ini juga terdapat pada kepemudaan yang berkualitas, berprestasi, peduli, kreatif dan inovatif dalam mengambil setiap peluang/kesempatan positif yang ada.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

   Penggunaan lahan di Kabupaten Bantul setiap tahunnya selalu berubah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul dinyatakan sebagai salah satu daerah penyangga pangan. Oleh karena berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), di Bantul ditetapkan seluas 13.000 ha, sehingga dalam hal ini perlu disiapkan dukungan data dan tindak lanjut dalam bentuk perda kabupaten. Sisi lain, masalah pola tanam, irigasi, distribusi pupuk dan hama tanaman menjadi ancaman potensial untuk mempertahankan sawah lestari.

9. Perhatian terhadap investasi di sektor riil

   Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat

10. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi
    Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran rumah, banjir karena luapan air selokan/air hujan, tanah longsor, kekeringan dan perubahan iklim global. Kondisi ini menuntut kesiap-siagaan, kecepatan waktu respon serta penanganan saat dan pasca bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

11. Visi Gubernur DIY menjadikan Pantai Selatan sebagai halaman muka DIY

    Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY mempunyai Visi bahwa Pantai Selatan Sebagai Halaman Muka DIY, atau “Among Tani menjadi Dagang Layar”, sehingga untuk mendukung dan menunjang visi tersebut perlu didukung dengan program/kegiatan di pantai selatan Bantul

12. Kabupaten Bantul dilalui jalur utama menuju Bandara Internasional dan Pembangunan Pabrik Baja di Kulonprogo

    Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo, akan menerima dampak terhadap rencana pembangunan kedua proyek tersebut, baik dampak ekonomi dan pengembangan wilayah, sehingga perlu diantisipasi dengan menyiapkan program/kegiatan yang mendukung

13. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, pantai selatan merupakan kawasan untuk pengembangan energi baru terbarukan, yaitu energi angin, energi sinar matahari, dan energi gelombang. Di sepanjang pantai selatan Bantul akan dibangun PLTB dengan daya sebesar 50MW yang memanfaatkan tanah Sultan Ground (SG).

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu :

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

A. *Rencana Strategis*
B. *Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014*
C. *Program untuk Pencapaian Sasaran*

"Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

PROJOTAMANSARI

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik dimusim hujan maupun dimusim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya sektor industri yang kuat dimasa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia penghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari

Misi 1
Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah;
   b) Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;
   c) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
2) Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat serta mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memenuhi syarat Sistem Manajemen Mutu, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
   b) Tepat waktu penyelesaian ijin;
   c) Tepat waktu penyelesaian pengaduan;
3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, didukung dengan 1 (sasaran) sasaran, yaitu Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.
4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah, didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda

Misi 2
Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyat Menuju Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia dan Berkepribadian Indonesia dengan Memperhatikan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi ini didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri);
   b. Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan.

3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan.

4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 9 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
   b. Meningkatnya kualitas perpustakaan;
   c. Meningkatnya sekolah berkualitas.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal.

6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya prestasi pemuda secara kuantitatif dan kualitatif;
   b. Meningkatnya prestasi olahraga secara kuantitatif dan kualitatif.

7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

b. Tersedianya informasi melalui media massa;
c. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
d. Pengembangan energi baru terbarukan.

8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah(DBKS), Keluarga Sakinah Teladan (KST) dan Pondok Pesantren)PPS);
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Misi 3
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pendapatan Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender

Misi ini didukung dengan 10 (sepuluh) tujuan, yaitu :

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan.

2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;;
   b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan;
   c. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian.

3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.

5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian;
b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata;
c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.

7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Berkembangnya kawasan KPY, BKM, pantai selatan, GMT dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kabupaten Bantul.

8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja;
   b. Menurunnya tingkat pengangguran;
   c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja;
   d. Terjaminnya hak-hak dan perlindungan pekerja;
   e. Terciptanya penempatan transmigran.

9) Memantapkan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Terwujudnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu;
   b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;
   c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;
   d. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Misi 4
Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Risiko Bencana dengan Memperhatikan Penataan Ruang dan Pelestarian Lingkungan

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Mantapnya penanggulangan bencana;

b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik

2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati;
   b. Terkelolanya sumberdaya hutan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 dirumuskan kembali menjadi IKU Kabupaten Bantul dan SKPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dan SKPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Perumusan IKU Kabupaten Bantul tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU Pemerintah Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut :

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Nilai EKPPD
2.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu
		Angka Kematian Bayi
		Persentase Gizi Buruk
		Usia Harapan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf
		Rata-rata lama sekolah
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
		Indeks Gini
7.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi
		Tingkat ketersediaan Protein
8.	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran
10.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin
11.	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh

Sumber : Bagian Tapem, 2014

3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

Tema pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel II.2 Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

2011	2012	2013	2014	2015
Menguatkan Kualitas SDM, memanfaatkan SDA, mengkaji dan mengembangkan inovasi IPTEK berwawasan lingkungan serta memperdayakan Ekonomi Lokal, berbasis penanggulangan bencana	Mengembangkan Kualitas SDM dan IPTEK, mengoptimalkan SDA berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing Ekonomi Lokal,berbasis penanggulangan bencana.	Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.	Memantapkan Kualitas SDM, mendayagunakan SDA dan IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.	Mewujudkan kualitas SDM dan IPTEK yang unggul serta pengelolaan SDA dalam rangka mencapai daya saing daerah yang tangguh, berbasis penanggulangan bencana.

Sumber : Bappeda, 2014

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul meliputi 11 program, sebagai berikut :

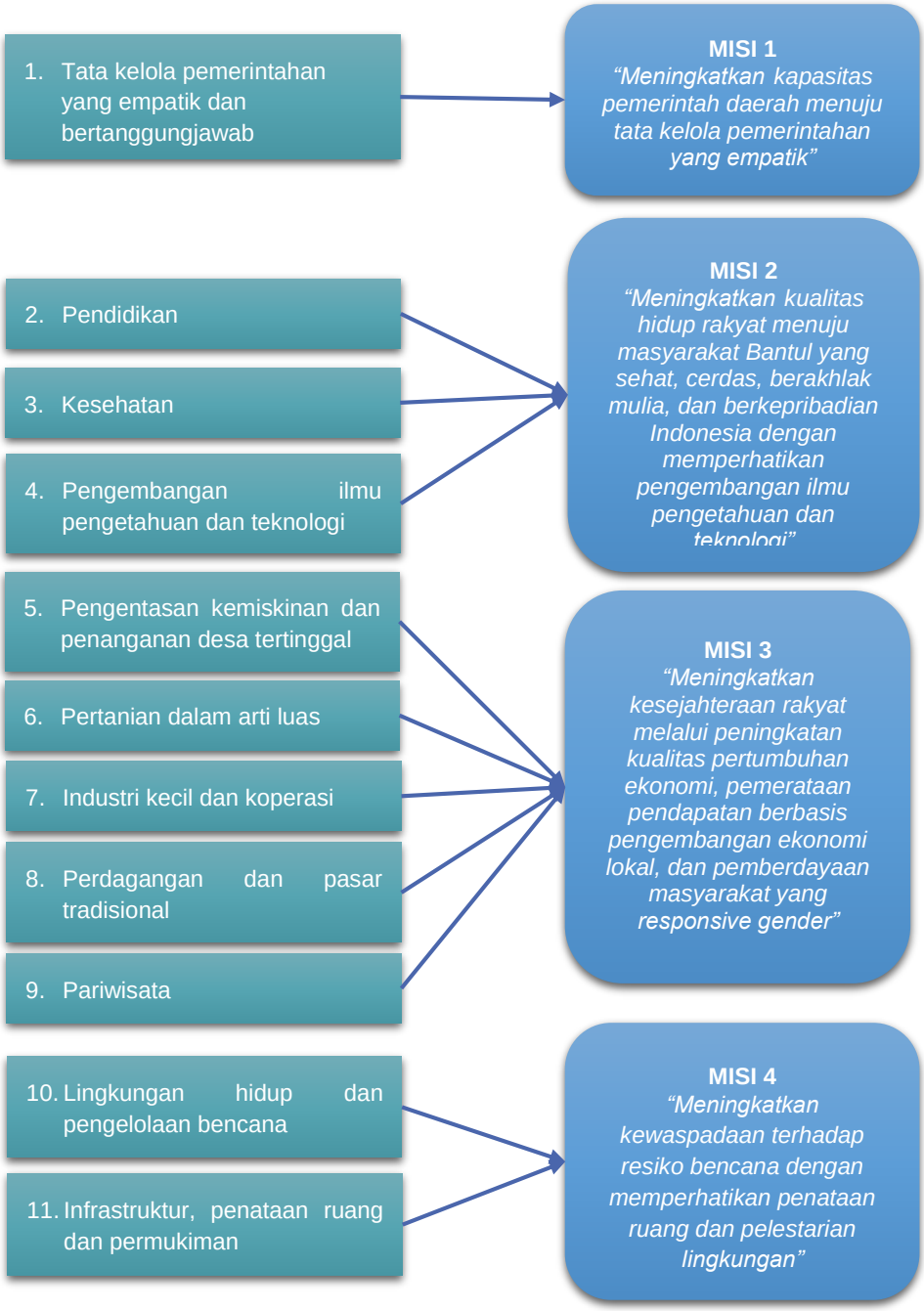

Gambar II.1 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

B.Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dilakukan revisi pada tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014. Format Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2014 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Semua yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2014 dilakukan dengan mengacu kepada Review RPJMD, RKPD 2014, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel II.3 Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	B (66)
		Nilai EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,1)
2.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	Opini	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik (75,65)
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Angka	75/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	Angka	7,5/1.000 KH
		Persentase Gizi Buruk	Persen	0,45
		Usia Harapan Hidup	Tahun	71,38
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	Persen	92,75
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,74
		Indeks Gini	Indeks	0,2304
7.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi	Persen	138,64
		Tingkat ketersediaan Protein	Persen	133,33
8.	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	5
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran	Persen	4,90
10.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	Persen	12
11.	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh	Persen	10,66

Sumber : Bagian Tapem, 2015

C.Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	16
2.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	6
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	28
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	10

No.	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	20
7.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	15
8.	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	9
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	8
10.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	16
11.	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	8

Sumber : Bagian Tapem, 2015, data diolah

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

A. *Capaian Indikator Utama Tahun 2014*
B. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
C. *Pencapaian Kinerja Lainnya*
D. *Akuntabilitas Anggaran*
E. *Efisiensi Sumber Daya*

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Baik	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Utama	2014		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	B	98,53
2	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	102,47
3	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,65	76,90	101,65
5	Angka Kematian Ibu	75/ 100.000 KH	104,7/ 100.000 KH	60,40
6	Angka Kematian Bayi	7,5/ 1.000 KH	8,75/ 1.000 KH	83,33
7	Persentase Gizi Buruk	0,45	0,38	115,56
8	Usia Harapan Hidup	71,38	71,62	100,34
9	Angka melek huruf	92,75	92,81	100,06
10	Rata-rata lama sekolah	9,1	9,02	99,12

No	Indikator Kinerja Utama	2014		
		Target	Realisasi	% Realisasi
11	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,74	5,44	94,77
12	Indeks Gini	0,2304	0,2441	94,05
13	Tingkat Ketersediaan Energi	138,64	139,28	100,46
14	Tingkat ketersediaan Protein	133,33	133,88	100,41
15	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	5	6,73	134,60
16	Angka pengangguran	4,90	4,3	112,24
17	Persentase jumlah penduduk miskin	12	12,41	96,58
18	Persentase Desa Tangguh	10,66	10,66	100,00

Sumber : Bagian Tapem, 2015, data diolah

Catatan :

- Untuk IKU 1, 2, 3, 9 dan 10 merupakan capaian kinerja tahun 2013 yang mendapatkan penilaian pada tahun 2014, sedangkan realisasi kinerja tahun 2014 baru bisa dilihat pada tahun 2015.

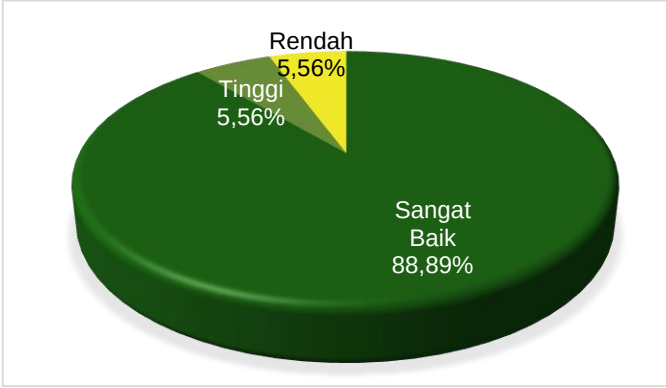

Gambar III.1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2014

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama Bupati Tahun 2014, disimpulkan bahwa 16 (enam belas) indikator sasaran atau sebanyak **88,89%** dalam kriteria **Sangat Baik**, bahkan 10 (sepuluh) IKU diantaranya realisasi mencapai **lebih dari 100%**. Sedangkan 1 (satu) IKU atau 5,56% masuk dalam kriteria **Tinggi** dan 1 (satu) indikator sasaran atau 5,56% hanya mencapai kriteria **Rendah**.

Sebanyak 1 IKU yang tercapai dengan kategori Rendah, yaitu Angka Kematian Ibu, yang realisasinya hanya mencapai 60,40% dari target. Sedangkan IKU yang pencapaiannya masuk dalam kategori Tinggi sebanyak 1 IKU, yaitu Angka Kematian Bayi yang terealisir sebanyak 83,33% dari target.Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	C	B	B	98,53	B	97,06
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	102,47	Sangat Tinggi	99,27

Sumber : Bagian Tapem, 2015, data diolah

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

   Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2014 adalah kategori B (nilai 66) terealisir B (nilai 65,03), telah tercapai 98,53% atau bernilai kinerja **Sangat Baik**. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebesar 47,68 dengan kategori C, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2014 sebesar 65,03. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2013, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2013 dikeluarkan oleh Kemenpan pada tahun 2014. Sedangkan target capaian tahun 2015 (akhir RPJMD) yaitu kategori B (nilai 67). Capaian tahun 2014 ini telah menyumbangkan 97,06% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Gambar III.2 Bupati Bantul, Ibu Hj. Sri Surya Widati didampingi Sekretaris Daerah, Bapak Drs. Riyantono, M.Si dalam Penerimaan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata capaian Kabupaten/Kota lain, dimana rata-rata hasil evaluasi sebesar 44,90. Tahun 2014 terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikan B dari 505 Kabupaten/Kota se Indonesia. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil meraih peringkat B. Prestasi ini tercapai karena adanya komitmen semua pihak, yaitu dari pucuk pimpinan sampai pada tataran pelaksana.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Bantul meraih nilai 65,03 atau mencapai predikat B.
b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul.
c. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah kabupaten dan SKPD dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
d. Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah kabupaten dan SKPD, secara umum dapat disimpulkan **Baik,** namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan yang akan datang, agar akuntabilitas kinerja pada pemerintah kabupaten dan SKPD terus meningkat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Beberapa hal tersebut, yaitu :

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dengan membangun ***Bantul Cyber City* y**ang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul***.*** Pengembangan e-gov bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan

E-government telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-government* adalah peningkatan efisiesi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-gov* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 42 sistem informasi, baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online.*

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2014 bisa diakses melalui http://lpse.bantulkab.go.id.

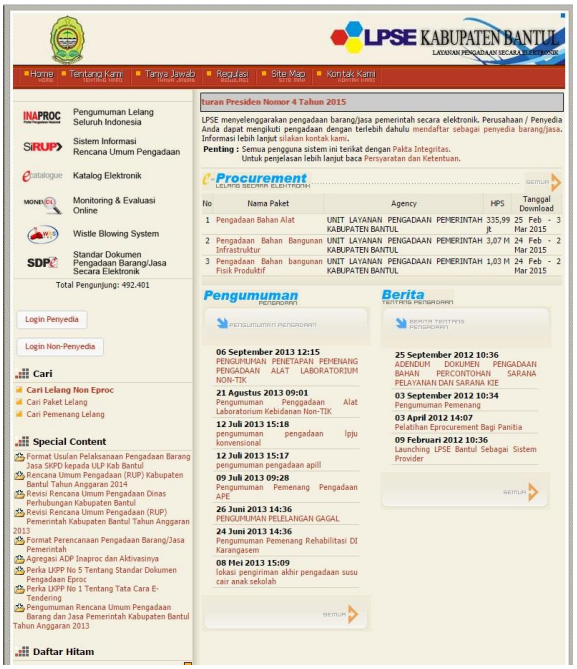

Gambar III.3 LPSE Kabupaten Bantul

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet pada Tahun 2014 sudah mencapai **125 Titik/site** yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan dan seluruh Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Bantul. Struktur sebaran Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet di lingkungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

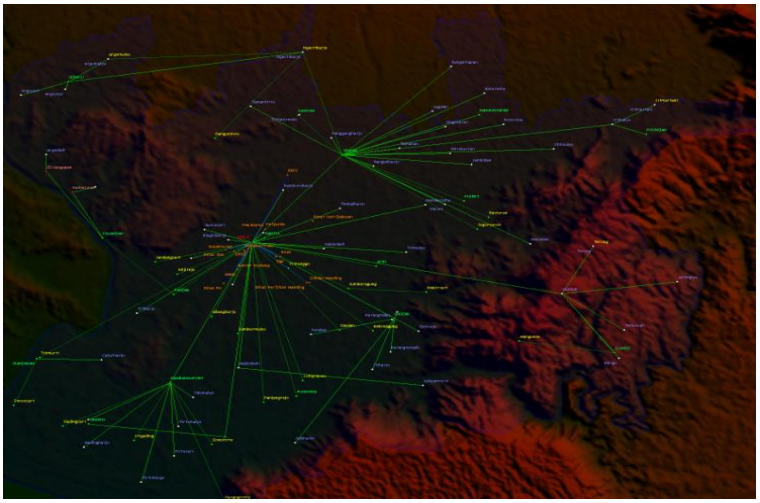

Gambar III.4 Struktur Sebaran Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan masuk ke tautan **esakip.bantulkab.go.id.** Dengan menggunakan user name dan password 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tertentu. eSAKIP ini juga sebagai sistem yang digunakan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD dalam waktu per tiga bulan/triwulanan. Berikut adalah tampilan awal untuk akses publik tersebut.

Gambar III.5 Tampilan Halaman Depan Esakip Bantul

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu "Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik".

Target tahun 2014 dengan nilai Sangat Tinggi, terealisir 102,47%. Capaian nila EKKPD tahun 2014 ini didapatkan dari target nilai 3,1 (Sangat Tinggi) terealisir sebesar 3,1766 (Sangat Tinggi) namun jika dilihat dari nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2013 yaitu skor 2,8177, mengalami pernurunan sebesar 0,2593 dari capaian tahun 2012 yaitu skor 3,0770. Nilai ini mengalami penurunan dikarenakan sistem penilaiannya menggunakan data pendukung, dan ada beberapa permintaan data pendukung yang belum dapat disajikan sesuai dengan LPPD yang disajikan. Untuk meningkatkan hasil EKPPD dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan
b. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan LPPD
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)
d. Merintis pembuatan SIM LPPD untuk mempermudah penyusunan LPPD

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 16 (enam belas) program sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Program Perencanaan Tata Ruang
15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
16. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Permasalahan :

a. Proses perbaikan memerlukan SDM yang *open mind* atas segala pembaharuan;
b. Masih lemahnya sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat.

c. Masih lemahnya kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja, bidang perencanaan dan evaluasi khususnya di jajaran SKPD secara berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi, persamaan persepsi dan pelatihan di seluruh SKPD.
b. Membangun sistem esakip sebagai basis data dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi masyarakat sebagai upaya pembangunan sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat.
c. Melakukan pendampingan dan pelatihan dengan ahli/narasumber dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dan narasumber lain yang kompeten.

Untuk rencana kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh SKPD dan pihak yang berkompeten, peningkatan SDM melalui pelatihan bagi seluruh SKPD dan perbaikan kinerja sebagai upaya peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh SKPD yang pada akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pelaksanaan indikator Opini Pemeriksaan BPK sejalan dengan misi “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik” yang menjadi misi 1 dalam RPJMD 2011-2015. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber : Inspektorat dan DPPKAD, 2015, data diolah

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil sangat baik. Pada tahun 2014, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ini adalah **Sangat Baik.**

Pencapaian WTP ini merupakan ini merupakan tahun kedua. Pencapaian ini, apabila dipertahankan, capaian ini juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 yaitu opini WTP. Realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2013 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2014. Hal ini didukung adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Bantul, diperkuat juga adanya penandatanganan Pakta Integritas untuk mempertahankan opini tersebut.

Gambar III.6 Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar di hadapan Bupati dan Wakil Bupati

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2010-2013 sebagai berikut :

Tabel III.5 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2013

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2011	WDP	Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan
2012	WTP	Paragraf penjelas berupa penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa
2013	WTP	Paragraf penjelas masih adanya Dana Alokasi Desa (ADD), Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas

Sumber : DPPKAD, 2015

Faktor lain yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Tahun anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 133 obyek pemeriksaan dengan pemeriksaan reguler sebanyak 48 obrik, 40 obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu s dan 35 obyek pemeriksaaan kasus. Hasil pemeriksaan berupa temuan/kesimpulan sebanyak 451, rekomendasi sebanyak 452 dan telah ditindak lanjuti sejumlah 422 rekomendasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2014, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Pengelolaan Barang Daerah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Permasalahan :

1. Tindak Lanjut hasil pengawasan Eksternal dan Internal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pengawas/auditor.
3. Masih terdapat beberapa SKPD dalam pengelolaan barang daerah belum tertib

Solusi :

1. Penguatan tindaklanjut hasil pengawasan Eksternal dan Internal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, kordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditan dalam melaksanakan penyelesaian tindaklanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor/P2UPD dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten
3. Penguatan Komitmen seluruh Kepala SKPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, yaitu tetap diperlukan penguatan komitmen seluruh pihak, baik pimpinan puncak maupun Kepala SKPD serta seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan dukungan terhadap misi 1 ”Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di berbagai sektor layanan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar yang dirasakan tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,532	75,65	76,90	101,65	75,67	101,63

Sumber : Bagian Organisasi, 2015, data diolah

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2014, capaian kinerjanya **Sangat Baik**. indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 75,65, realisasi IKM tahun 2014 IKM mencapai angka 76,90 atau 101,65 dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 101,63% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul pada tahun 2010 adalah 75.00, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 75,75. Tahun 2012 nilai IKM adalah 76,14 tahun 2013 sebesar 77,53 dan tahun 2014 sebesar 76,9. Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM SKPD Pemberi Layanan se Kabupaten Bantul. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP).

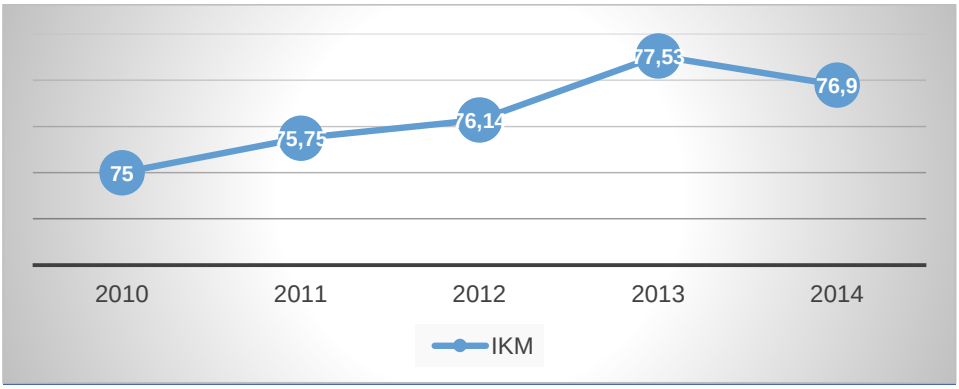

Gambar III.7 Perkembangan IKM Tahun 2010-2014

Permasalahan atas sasaran menigkatnya kualitas pelayanan publik yaitu adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi, sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar III.8 Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagai salah satu UPP

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2014, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 9 (sembilan) program sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Kematian Ibu	96,83/ 100.000 KH	75/ 100.000 KH	104,7/1 00.000 KH	60,40	70/ 100.00 0 KH	50,43
2.	Angka Kematian Bayi	9,39/ 1.000 KH	7,5/ 1.000 KH	8,75/ 1.000 KH	83,33	7/1.000 KH	75,00
3.	Persentase Gizi Buruk	0,22	0,45	0,38	115,56	0,43	111,63
4.	Umur Harapan Hidup	71,35	71,38	71,62	100,34	71,5	100,17

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015, data diolah

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 ”Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selengkapnya masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu

   Pencapaian AKI pada tahun 2014 sebesar 104,7/100.000 KH meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 96,83/100.000 KH dari target 75/100.000 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 60,40% dalam kriteria **Rendah.**

   Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas pada tahun 2014 sebanyak 14 orang. Capaian tahun 2014 menyumbangkan angka 50,43% atas target RPJMD tahun 2015, diharapkan AKI hanya terealisir 70/100.000 KH. Selanjutnya kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut :

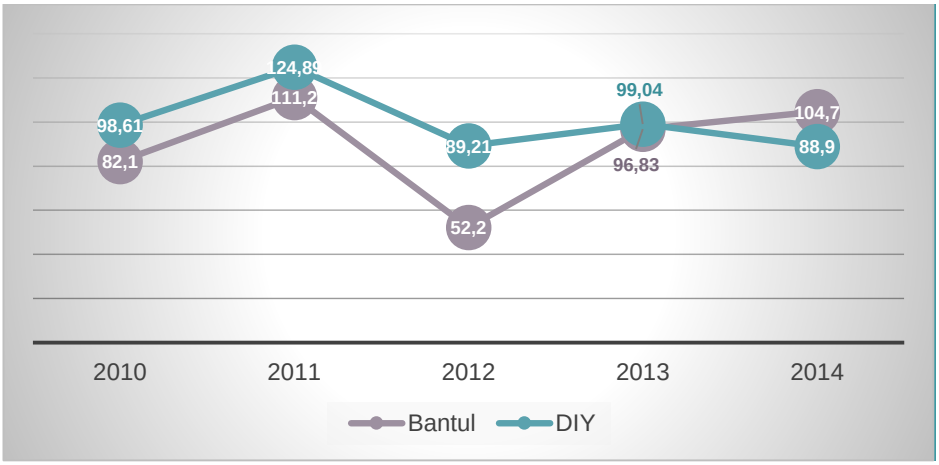

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Gambar III.9 *Trend* AKI Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014

Trend AKI mengalami fluktuasi. Semua kejadian kematian ibu di Kabupaten Bantul telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang dilaksanakan dalam rangka mengkaji hal–hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi ibu sejak masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Kajian audit diperoleh hasil bahwa penyebab kematian ibu dengan adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, asma dan kanker sebanyak 7 kasus (50%), an penyebab kematian ibu sebesar 50% karena penyebab langsung yaitu perdarahan dan *eclampsia*.

2. Angka Kematian Bayi

AKB pada tahun 2014 sebesar 8,75/1000 KH dari target 7,5/1000 KH dengan nilai realisasi kinerja sebesar 83,33% termasuk kategori **Tinggi,** dan mengalami penurunan kematian dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 9,39/1000 KH. Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada lima tahun terakhir dari tahun 2010 - 2014 disajikan dalam gambar berikut ini :

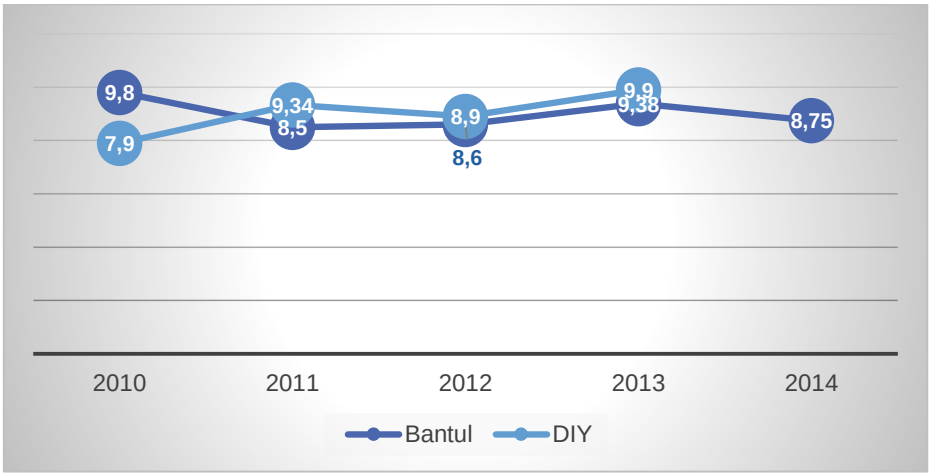

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Gambar III.10 *Trend* Angka Kematian Bayi Tahun 2010 – 2014

Realisasi tahun 2012 sebesar 8,47/1.000 KH dengan kematian sebanyak 116 bayi, dibandingkan tahun 2013 realisasi angka kematian bayi sebesar 9,39/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 126 bayi berarti terjadi kenaikan jumlah kematian sebanyak 12 bayi pada tahun 2013. Realisasi AKB tahun 2014 sebesar 117/1.000 KH, mengalami penurunan sebanyak 9 bayi dibandingkan tahun 2013 Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 7/1.000 KH. AKB menurut penyebab kematian disajikan sebagai berikut :

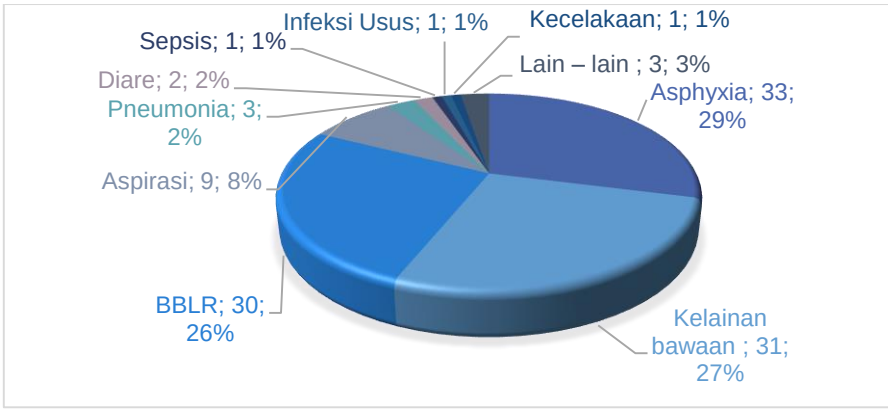

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Gambar III.11 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian

3. Persentase Gizi Buruk

Persentase gizi buruk menunjukkan keberhasilan, dimana tahun 2014 capaian kinerjanya melebihi target. Dari target 0,45% terealisasi 0,38%., atau 115,56% masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian ini telah mencapai 88,37% dari target akhir RPJMD tahun 2015. Persentase gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun sesuai dengan harapan, dapat dilihat dalam gambar berikut :

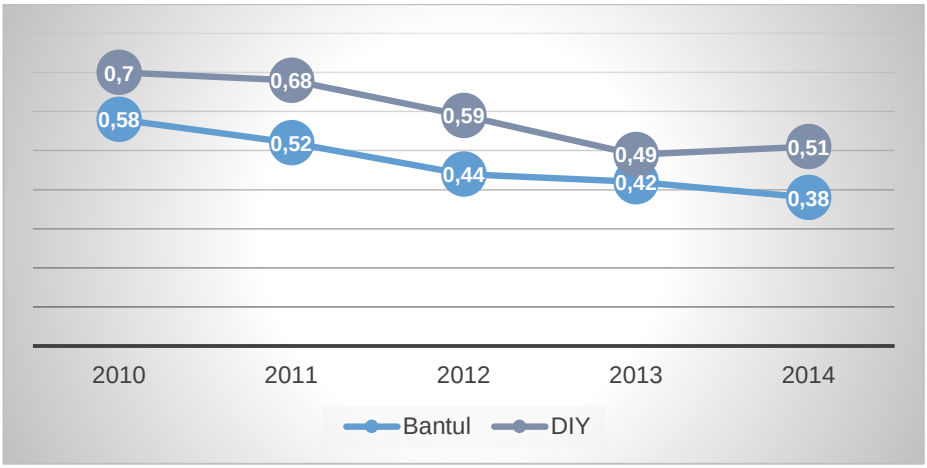

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Gambar III.12 *Trend* Gizi Buruk Tahun 2010 – 2014

Mencermati grafik diatas, terdapat kecenderungan penurunan status gizi buruk pada Balita. Program perbaikan gizi mencakup beberapa kegiatan yaitu surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu). Upaya lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 215 Balita serta kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter ahli anak di Puskesmas. Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin sudah tercapai 100%. Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 340 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan.

4. Umur Harapan Hidup

Indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2014, capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 71,38 tahun terealisasi 71,62 tahun atau 100,34% atau masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian ini telah mencapai 100,17% dibandingkat target pada akhir RPJMD tahun 2015, diartikan telah melampaui pencapaian target pada akhir RPJMD.

Umur harapan hidup (UHH) pada waktu lahir (e_o) adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang. UHH menjadi suatu indikator peningkatan derajat kesehatan.

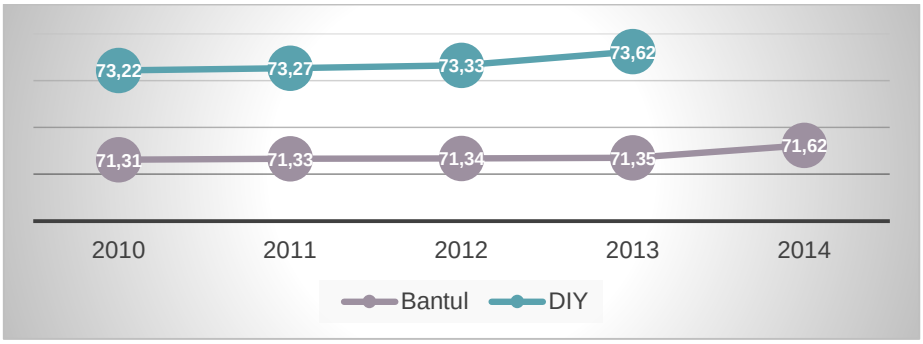

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Gambar III.13 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014

Tren Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut. UHH pada Tahun 2010 yaitu 71,31 tahun, Tahun 2011 sebesar 71,33 tahun, Tahun 2012 sebesar 71,34, Tahun 2013 sebesar 71,35 dan Tahun 2014 sebesar 71,62 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

Gambar III.14 Manula di Bantul

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk

dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

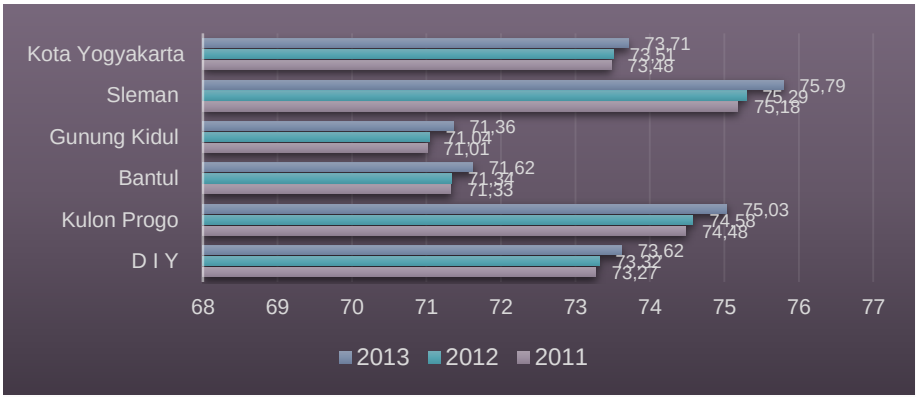

Gambar III.15 UHH menurut Kabupaten Kota di DIY

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Gambar III.16 Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan

dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk .Rasio ketersediaan tenaga dokter umum di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan pada angka 0,11 tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar 0,13, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0,11. Rasio ini menunjukkan jumlah dokter yang tersedia per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis meningkat dari 0,043 pada tahun 2011, menjadi 0,048 pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 0,40. Sedangkan tahun 2014 rasio dokter spesialis sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul.

Tabel III.8 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Dokter Umum	101	114	123	106
2	Jumlah Dokter Spesialis	40	45	38	39
3	Jumlah Penduduk	921.253	930.276	938.433	968.632
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,11	0,12	0,13	0,11
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,043	0,048	0,40	0,04

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jarak tempuh terjauh dari . Sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 67 unit pada 75 Desa. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.

Tabel III.9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2010 (unit)	2011 (unit)	2012 (unit)	2013 (unit)	2014 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	9	9	10	10	10
2	Rumah Sakit Khusus	3	3	3	4	4
3	Balai Pengobatan	78	70	55	29	25
4	Rumah Bersalin	32	33	22	18	14
5	Klinik Pratama	-	-	-	-	12
6	Klinik Utama	-	-	-	-	2

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2010 (unit)	2011 (unit)	2012 (unit)	2013 (unit)	2014 (unit)
7	Klinik Rawat Inap Medik Dasar	-	-	3	5	5
8	Apotek	100	108	100	106	110
9	Toko Obat	4	3	2	1	1
10	Laboratorium Kesehatan	4	4	3	3	4
11	Optik	8	11	12	11	11
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67
15	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
16	Posyandu	1123	1123	1.123	1.128	1.132
17	Industri Kecil Obat Tradisional	-	-	-	4	14
18	Pengobat Tradisional	-	-	-	146	174

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

Gambar III.17 Puskesmas Banguntapan Satu

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 868.513 jiwa (89,66%).

Tabel III.10 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2014

No.	Jenis Jaminan	Jumlah Peserta (jiwa)	Penyelenggara	Sumber Biaya Premi
1	JKN - PBI	472.445	BPJS Kesehatan	Pemerintah RI
2	Jamkesos	50.000	Pem. DIY	Pemerintah DIY
3	Jamkesda	220.000	Pemkab Bantul	Pemkab Bantul + Pemda DIY
4	JKN – PNS	94.062	BPJS Kesehatan	PNS dan Pemerintah
5	JKN – TNI/POLRI	5.724	BPJS Kesehatan	
6	JKN – Jamsostek	19.389	BPJS Kesehatan	Pegawai danperusahaan
7	Askes Komersial	6.893	Asuransi Swasta	Masyarakat
	Jumlah	868.513		

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 28 (dua puluh delapan) program sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
10. Program Pengawasan Obat dan Makanan
11. Program pengembangan data/Informasi/statistik daerah
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
16. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak
17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
19. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
20. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

21. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
22. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
23. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
24. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
25. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
26. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
27. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
28. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Permasalahan :

a. Terjadi pergeseran penyebab kematian, dari penyebab langsung kehamilan dan persalinan ke penyebab tidak langsung, yaitu penyakit penyerta : kanker, jantung, asma. Dimana sudah ada *warning* untuk tidak boleh hamil, dari awal sudah terdeteksi.
b. Pergeseran penyebab kematian bayi dari BBLR dan penyakit infeksi ke penyebab yang bersifat kongenital dan asfiksia yang sulit disembuhkan.

Solusi :

a. Koordinasi lintas sektor untuk Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif.
b. Peningkatan kualitas SDM baik aparat maupun masyarakat.

Gambar III.18 Senam Lansia sebagai Upaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia

Melihat hal tersebut di atas, terutama terhadap permasalahan Angka Kematian Bayi yang tidak mencapai target, perencanaan program di tahun yang akan datang lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal *teamwork* yang solid serta *response time* yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dalam misi 2 “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka melek huruf (%)	92,19	92,75	92,81	100,06	91,54	101,39
2..	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,95	9,1	9,02	99,12	9,2	98,04

Sumber : BPS, 2014

1. Angka Melek Huruf

   Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.

   Menurut BPS, Angka Melek Huruf yang keluar pada tahun 2014 merupakan angka melek huruf tahun 2013. Realisasi angka melek huruf telah menunjukkan hasil positif, sebagaimana tabel di atas. Realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 92,81% dari target 92,75% atau sebanyak 100,06%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**. sedangkan dilihat dari target kinerja akhir RPJMD tahun 2015 telah mencapai sebesar 101,39%.

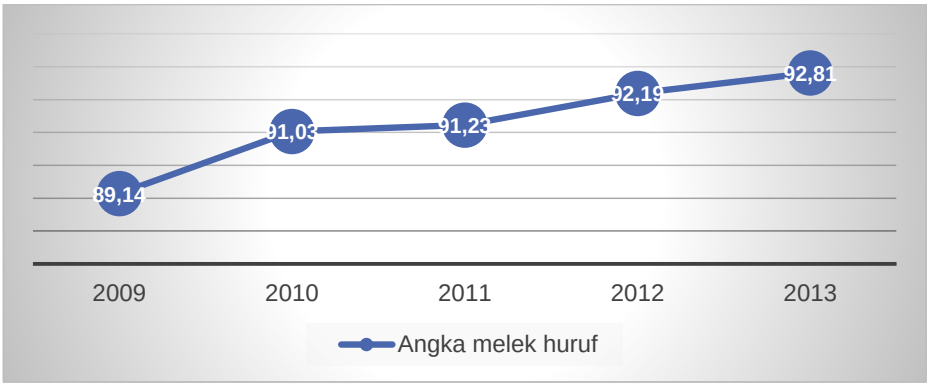

Sumber : BPS, 2014

Gambar III.19 *Trend* Angka Melek Huruf Tahun 2009 - 2013

Tren angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebesar 89,14% meningkat menjadi 91,03% pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar 91,23 % meningkat menjadi 92,19 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 92,81. Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten/Kota di wilayah DIY, dapat dilihat sebagai berikut :

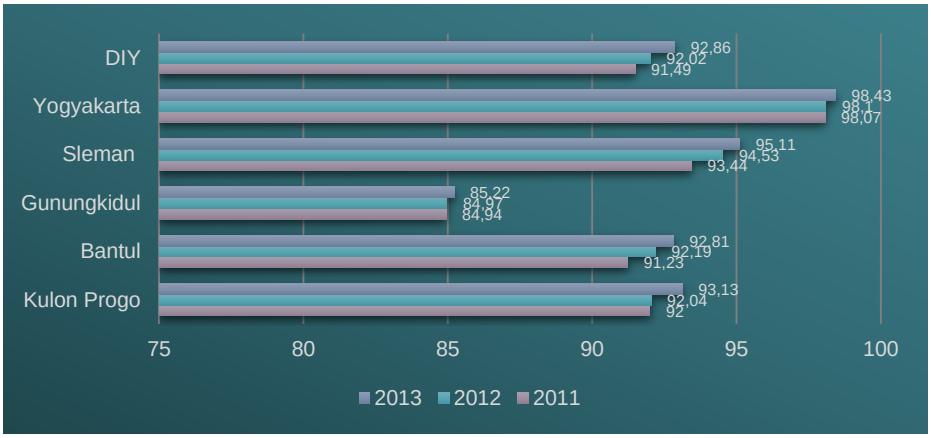

Sumber : BPS, 2014

Gambar III.20 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2011 – 2013

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar III.21 Semangat Belajar Tak Kenal Usia

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan angka melek huruf Kabupaten Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul.

2. Rata-rata lama sekolah

Seperti juga angka melek huruf, komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Angka rata–rata lama sekolah adalah rata–rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator kinerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **Sangat Baik**, karena mencapai 99,12% dari target yang telah dirumuskan. Menurut BPS, angka Rata-rata lama sekolah yang keluar pada tahun 2014 merupakan rata-rata lama sekolah tahun 2013. Pencapaian rata-rata lama sekolah adalah 9,02 tahun dibandingkan dengan target sebesar 9,1 tahun. Pencapaian ini telah mencapai 98,04% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 9,2 tahun.

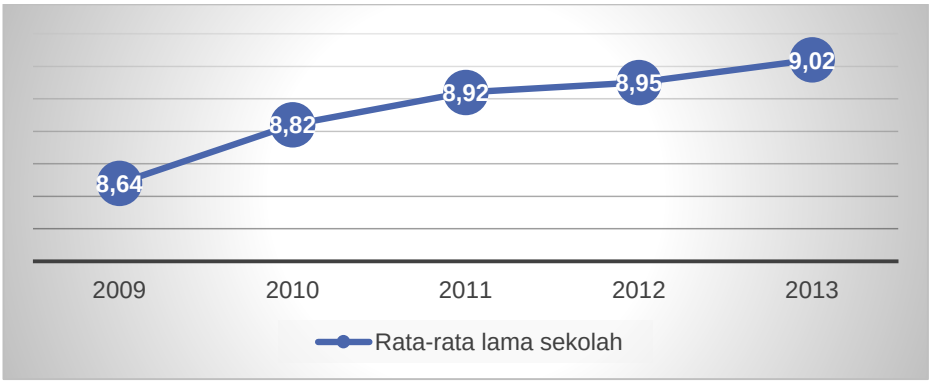

Sumber : BPS, 2014

Gambar III.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2013

Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dari 8,64 tahun di tahun 2009 menjadi 9,02 tahun di tahun 2013, meningkat sebanyak 0,38 poin.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bantul semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, seperti halnya angka melek huruf, stagnasi capaian tahun 2012 dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 dimana rata-rata lama sekolah tetap, perlu menjadi perhatian untuk pengembangan strategi yang lebih efektif.

Gambar III.23 Keceriaan Anak Sekolah di Bantul

Angka rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan, walaupun terjadi stagnasi pada tahun 2009 dan 2010 Kota Yogyakarta serta pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar sebagai berikut :

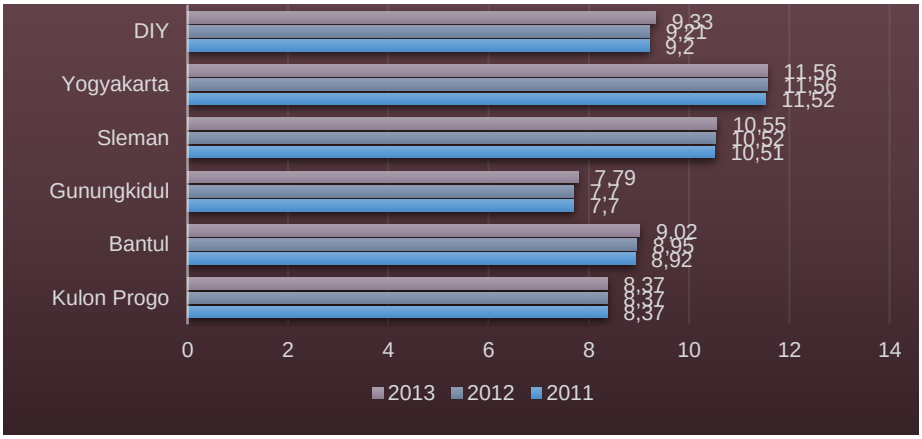

Sumber : BPS, 2014

Gambar III.24 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2011 – 2013

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas pendidikan. Pada tahun 2014, sebanyak 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Non Formal
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
7. Program Pendidikan Menengah
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Permasalahan :

1. Mayoritas penduduk yang masih buta huruf adalah penduduk berusia lanjut.
2. Anak usia sekolah menengah memasuki dunia kerja.

3. Peningkatan pernikahan dini. Data yang mengajukan dispensasi ijin kawin 2013 sebanyak 451 anak, 2014 sebanyak 453 anak.

Solusi :

1. Memfokuskan program pengentasan buta huruf pada kelompok lansia.
2. Koordinasi lintas sektor dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul.

6. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan

Pertumbutan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi – yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan – tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian pemerataan pendapatan.

Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,46	5,74	5,44	94,77	5,88	92,52
2.	Indeks Gini	0,2495	0,2304	0,2441	94,05	0,2281	92,99

Sumber : BPS, 2015

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan merupakan pelaksanaan dari Misi 3 “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang *responsive* gender".

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

   Tingkat pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik dari 5,47% menjadi 5,74% pada tahun 2014. Realisasi pencapaian sebesar 5,44% atau sebanyak 94,08% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja **Sangat Baik** untuk tahun 2014. Selain itu, jika disandingkan dengan target RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 91,84% dari target RPJMD untuk meningkatkan pertumbutah ekonomi sebesar 5,88% pada tahun 2015.

   Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2014 mampu tumbuh sebesar 5,44% mengalami peningkatan sebesar 8,64% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 sebesar 4,97%. Kemudian dalam jangka lima tahun terakhir (2010-2014) laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul berhasil mencapai rata-rata sebesar 5,32% dan berada di atas rata-rata capaian DIY sebesar 5,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul secara umum tumbuh relatif stabil dan termasuk kategori daerah berkembang cepat.

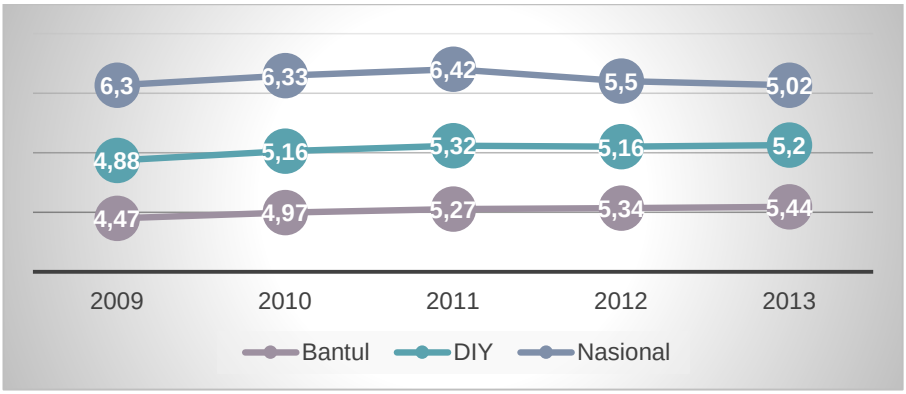

Sumber : BPS, 2014

Gambar III.25 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2010 – 2014

Gambar III.26 Peternakan Sapi di Bantul

Pencapaian tersebut di atas dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki peran dan pertumbuhan yang cukup besar. Pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sektor yang memiliki rata-rata kecenderungan pertumbuhan paling tinggi adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan perlambatan pada sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang secara umum tergambar dari pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir dengan semakin menggeliatnya jasa dan perdagangan di Kabupaten Bantul.

Kemudian bila dilihat dari sisi pertumbuhan sektoral, Kabupaten Bantul pada tahun 2014 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa. Namun terjadi perubahan komposisi kontribusi dalam penyusun perekonomian yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18,56%; industri pengolahan sebesar 18,63%; pertanian sebesar 18,64%; serta sektor jasa-jasa sebesar 15,69%. Kontribusi sektor pertanian yang dalam 5 tahun terakhir selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul.

Gambar III.27 Peranan Sektor Ekonomi Penyusun PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2014

Struktur perekonomian Kabupaten Bantul tahun 2010 – 2014 masih didominasi oleh peran tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2014, ketiga sektor tersebut secara keseluruhan mampu menyumbang 55,85 persen. Namun demikian jika dilihat dari tahun 2010 terjadi kecenderungan semakin meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dan menurunnya kontribusi sektor pertanian, sebagaimana pada tabel pada lampiran III.

2. Indeks Gini

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2014 mencapai 194,05% dari target, atau memiliki capaian kinerja **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 92,99% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2281.

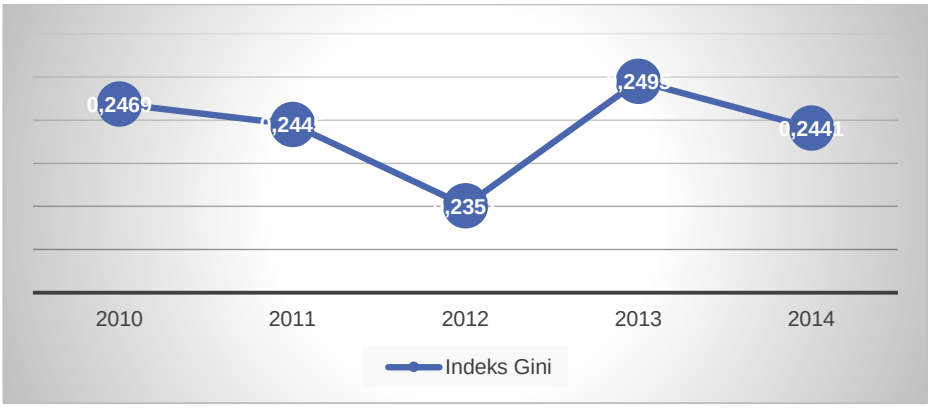

Sumber : BPS, 2015

Gambar III.28 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2010- - 2014

Gambar III.29 Membatik

Trend indeks gini dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013, hal ini berari ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata, namun demikian di tahun 2014 ketimpangan pendapatan semakin merata dengan menurunnya indeks gini pada angka 0,2441 dari 0,2495 di tahun 2013.

Upaya menjawab persoalan ketimpangan pendapatan juga didorong oleh pengembangan skema keluarga sejahtera. Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2014 menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera mengalami kenaikan kemudian menurun pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III. Dengan kata lain, upaya yang berfokus pada mereka yang berada pada garis terbawah (Pra sejahtera dan KSI) perlu terus dikuatkan ke depan.

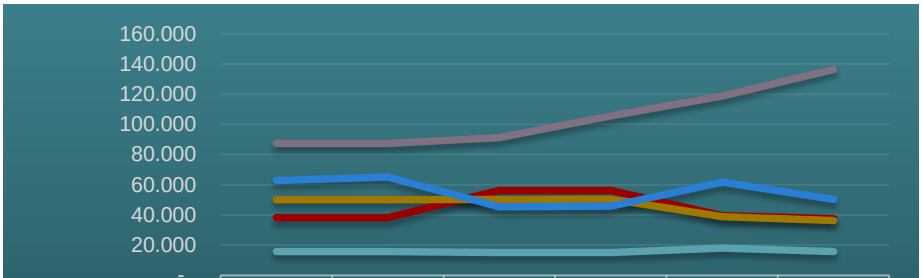

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pra S	38.247	38.247	56.194	56.281	39.424	37.500
KS I	50.086	50.086	50.275	50.510	38.903	36.300
KS II	62.799	65.113	45.417	45.847	61.659	50.337
KS III	87.352	87.352	91.249	105.739	118.741	136.458
KS III Plus	15.665	15.665	15.159	15.186	18.077	15.771

Gambar III.30 Trend Keluarga Sejahtera Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014

Permasalahan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan adalah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan dikarenakan pengaruh ekonomi dunia. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah; percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2014, sebanyak 20 (dua puluh) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
13. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

14. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
15. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
16. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
19. Program Perencanaan Tata Ruang
20. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah merupakan pelaksanaan dari Misi 3 “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang *renponsive* gender”.

Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Ketersediaan Energi	134,09	138,64	139,28	100,46	140,91	98,84
2.	Tingkat ketersediaan Protein	128,88	133,33	133,88	100,41	136,21	98,29

Sumber : BKPPP, 2015, data diolah

1. Tingkat Ketersediaan Energi

Tingkat ketersediaana energi menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya tercapai 100,46% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Dari target 138,64%, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi hanya mencapai 139,28%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 98,84% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 maka telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 3,9%. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 3.064 Kkal/Kap/hr maka capaian ini sudah diatas standar Nasional (2.200 Kkal/Kap/hr).

2. Tingkat Ketersediaan Protein

Tingkat ketersediaana protein menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya tercapai 100,41% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja **Sangat Baik**. Dari target 133,33%, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi mencapai 133,88%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 98,29% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Angka Kecukupan Protein sebesar 76,31 Gr/Kap/hr maka Capaian ini sudah diatas standar Nasional (57 Gr/Kap/hr)

Gambar III.31 Berbagai Lomba Kreasi Pangan B2SA Tahun 2014

Sejalan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Instruksi Bupati Bantul Nomor 03 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Instruksi Bupati Bantul 04 tahun 2012 Penyajian Hidangan pada Pertemuan/Rapat dengan Bahan Pangan Lokal, serta dalam rangka mendukung pemenuhan ketercukupan energi dan protein serta mendorong inovasi, ketrampilan dan kreatifitas masyarakat agar mampu menciptakan produk berciri khas daerah yang unik, berkualitas dan elegan sehingga dapat bersaing dengan produk luar, Kabupaten Bantul menyelenggarakan berbagai lomba.

Lomba yang diadakan antara lain : Lomba Olahan Pangan Lokal, Lomba Tumpeng Triguna Non Beras, Lomba Kudapan PMT-AS untuk anak TK dan Festival Pisang Ambon yang diikuti perwakilan dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Lomba yang rutin diadakan ini untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu B2SA yang berbasis sumber daya lokal dengan pangan sumber karbohidrat selain beras

dan terigu sehingga dapat membangun budaya keluarga dan masyarakat untuk mengkonsumsi aneka menu makanan khas daerah sesuai prinsip B2SA, antara lain melalui pemanfaatan pekarangan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
8. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
9. Program Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
11. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
15. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Permasalahan :

1. Sumber daya manusia bidang pertanian masih didominasi oleh petani yang berusia tua.
2. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
3. Adanya alih fungsi lahan.

Solusi :

1. Melaksanakan program penyuluh menyentuh, khususnya pengenalan sedini mungkin kepada anak-anak untuk mencintai pertanian, perikanan dan peternakan agar mereka tertarik terjun dan menggeluti dunia pertanian.
2. Pemanfaatan pekarangan melalui budidaya tanaman pangan, ternak dan perikanan dalam berbagai kegiatan.
3. Moratorium alih fungsi lahan dan kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan.

8. Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata

Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase peningkatan jumlah wisatawan (%)	-8,62	5	6,73	134,60	5	134,60

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015, data diolah

Sasaran meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata mengalami pencapaian kinerja **Sangat Baik**. Persentase peningkatan jumlah wisatawan tahun 2013 ditargetkan sebesar 5% terealisir 6,73% atau 134,60%. Capaian ini menyumbangkan 134,60% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Sejak tahun 2000, Desa Wisata di Kabupaten Bantul telah dibentuk. Sampai saat ini Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul sebanyak 34 desa. Selengkapnya obyek wisata di Kabupaten Bantul 2010 - 2014 disajikan sebagai berikut :

Tabel III.15 Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2014

No.	Obyek Wisata	2010	2011	2012	2013	2014	Keterangan
1	Alam	9	9	9	10	10	Pantai, goa, ekosistem bakau
2	Buatan	5	5	5	5	6	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro
3	Sejarah, budaya	15	18	20	21	21	Warisan budaya, cagar budaya, desa budaya
4	Museum	9	9	9	9	10	Dirgantara, wayang, benda purbakala, budaya Jawa, batik, alat tani tradisional, tokoh terkenal, gumuk pasir, koleksi penghayat kepercayaan

No.	Obyek Wisata	2010	2011	2012	2013	2014	Keterangan
5	Desa Wisata	18	24	24	33	34	16 dari 34 desa wisata yang ada sudah sering menerima kunjungan.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

Sedangkan sarana wisata Kabupaten Bantul sampai tahun 2014 yaitu hotel berbintang empat sebanyak 1 buah, hotel non bintang sebanyak 76 buah dan restoran/rumah makan sebanyak 159 buah.

Gambar III.32 Pantai Selatan Bantul

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2010 mencapai 1.496.626 orang, menjadi 2.298.351 pada tahun 2014. Sedangkan jumlah PAD yang disumbangkan tahun 201 sebesar Rp.4.596.019.826,00, meningkat menjadi Rp.9.767.144.025,00 pada tahun 2014. Peningkatan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi obyek wisata alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.

Tabel III.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2010	1.496.626	4.596.019.826,00
2011	1.740.417	5.289407.718,00
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.153.404	9.120.764.368,00
2014	2.298.351	9.767.144.025,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul di masa mendatang.

Gambar III.33 Sendang Ngembel sebagai Keselarasan Alam dan Budaya

Event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi Pagelaran Wayang Kulit, Festival Dalang Cilik, Gelar Seni Budaya Yogyakarta, Gelar Kesenian Luar Daerah, Festival Kesenian Tradisional, Sarasehan Budaya, Festival Sendratari, Gelar Seni Pertunjukan, Parade Tari Nusantara, Festival Langen Carito, Festival Reog dan Jathilan se-DIY, Bentara Upacara Adat se-DIY, Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY, Festival Sendratari se-DIY, Festival Ketoprak se-DIY, Festival Dalang se-DIY, Festival Keroncong se-DIY, Festival Budaya se-DIY, Festival Desa Budaya se-

DIY serta Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY. Event-event budaya ini juga didukung oleh Danais dari Pemerintah DIY.

Gambar III.34 Asisten Administrasi Umum dalam Pagelaran Ketoprak

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata. Pada tahun 2014, sebanyak 9 (sembilan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
8. Program Perencanaan Tata Ruang
9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Permasalahan :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan sadar wisata di setiap obyek wisata di Kabupaten Bantul
2. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah

Solusi :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan lembaga pengelola dalam menangani setiap permasalahan di obyek wisata dan pelaksanaan kampanye Sadar Wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media;
2. Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyeki wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul;

9. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

Masalah yang dihadapi Kabupaten Bantul adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan masalah pengangguran. Peluang kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan,

yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil.

Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka pengangguran	5,01	4,90	4,3	112,24	4,7	108,51

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015

Menurunnya tingkat pengangguran tahun 2014 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Baik**, dari target 4,90 terealisir 4,3 atau tercapai 112,24%. Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 108,51% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Kenyataan yang ada selama ini, jumlah angkatan kerja di Bantul cukup besar sementara di sisi lain penciptaan lapangan kerja masih terbatas sehingga masalah pengangguran selalu ada dari tahun ke tahun.

Tabel III.18 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014

No	Kecamatan	2010		2011		2012		2013		2014	
		B	P	B	P	B	P	B	P	B	P
1	Srandakan	17.446	333	17.666	267	19.931	1.853	46.263	1.314	16.112	**1.336**
2	Sanden	16.903	2.747	16.192	2.497	18.805	2.415	22.534	1.261	15.398	**1.082**
3	Kretek	18.827	766	18.680	615	17.210	1.844	16.339	1.555	15.219	**1.284**
4	Pundong	15.702	481	15.748	386	15.772	362	16.312	509	15.025	**979**
5	Bblipuro	27.637	2.921	24.685	2.361	22.249	1.674	16.220	1.671	17.058	**1.135**
6	Pandak	30.206	1.324	29.471	1.984	32.500	870	29.472	1.345	27.087	**911**
7	Bantul	33.747	4.239	32.396	4.286	36.841	3.804	34.669	4.437	27.624	**1.890**
8	Jetis	27.562	1.579	25.064	2.007	25.090	1.793	25.452	1.472	27.195	**2.696**
9	Imogiri	37.364	1.658	36.198	1.466	34.444	1.335	36.688	1.356	35.836	**1.161**
10	Dlingo	21.894	1.181	22.948	1.176	28.759	865	27.100	1.016	26.173	**759**
11	Pleret	19.652	792	25.410	2.886	29.540	2.072	29.625	2.067	22.678	**1.068**
12	Piyungan	21.752	1.005	20.514	588	27.371	3.051	23.278	585	21.987	**1.323**
13	Bguntapan	50.857	2.022	51.992	1.432	55.192	958	56.659	1.749	57.955	**1.320**

No	Kecamatan	2010		2011		2012		2013		2014	
		B	P	B	P	B	P	B	P	B	P
14	Sewon	49.509	4.088	43.828	2.645	43.456	1.309	49.374	2.040	42.106	**2.187**
15	Kasihan	44.358	2.726	47.709	2.801	46.237	2.463	46.263	2.456	45.109	**1.473**
16	Pajangan	20.005	962	20.809	701	21.091	309	20.080	169	18.117	**544**
17	Sedayu	28.001	1.315	27.257	1.121	27.505	098	25.835	1.186	23.422	**1.368**
	Jumlah	481.422	30.139	476.567	29.219	501.993	28.075	496.370	26.188	454.101	**22.516**
	Persentase		**6,3**		**5,8**		**5,3**		**5,01**		**4,3**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa secara proporsional, jumlah penganggur menurun dari 5,8% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sampai pada tahun 2014 berada di angka 4,3%. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran salah satunya dilaksanakan kegiatan padat karya.

Gambar III.35 Kegiatan Padat Karya

Permasalahan pengangguran juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia atau tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah penganggur dari tahun ke tahun didominasi oleh golongan tingkat pendidikan rendah seperti SD, SLTP dan SLTA. Kondisi pendidikan para penganggur selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.19 Jumlah Penganggur Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014

No.	Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tidak tamat SD	5.409	6.273	4.651	4.777	3.924
2	SD	7.131	6.486	6.316	5.309	4.800
3	SLTP	7.170	6.499	6.734	5.692	5.551
4	SLTA	7.882	6.485	6.670	5.571	5.750
5	Akademi	1.400	1.987	2.117	2.771	1.494
6	S1/S2	1.147	1.489	1.587	2.068	997
	Jumlah	**30.1399**	**29.219**	**28.075**	**26.188**	**22.516**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015

Dalam rangka memenuhi hak pekerja ditetapkan UMK yang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat pula, sebagai berikut :

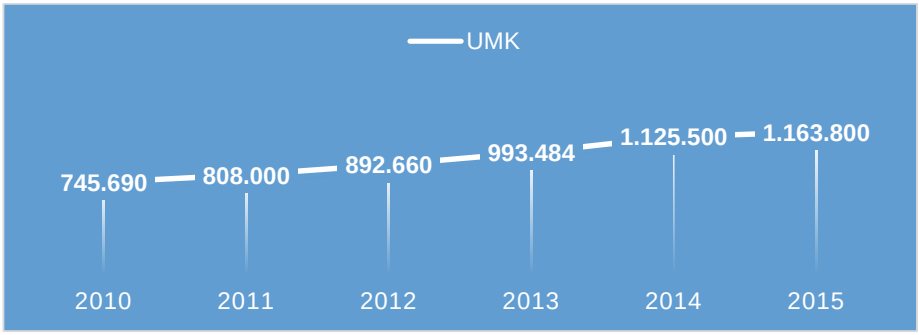

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015

Gambar III.36 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2010 - 2015

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2014, sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7. Program Perluasan Kerja
8. Program Transmigrasi Regional

Permasalahan :

1. Pertambahan angkatan kerja yang terus meningkat membutuhkan lowongan pekerjaan yang banyak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Ketrampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Solusi :

1. Dilakukan pencarian lowongan pekerjaan melalui *job canvasing* dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *on-line*.
2. Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan lebih diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pengguna dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus.

10. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat menyatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari ”memajukan kesejahteraan umum ”rakyat Bantul” dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan sarana dan prasarana publik.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan sebagai pelaksanaan dari Misi 3, *“Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsive gender”.*

Tabel III.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase jumlah penduduk miskin	13,48	12	12,41	96,58	12	96,58

Sumber : BKKPPKB, 2015, data diolah

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan kinerja **Sangat Baik**. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator persentase jumlah penduduk miskin yang mengalami capaian 96,58% dari target yang ditetapkan. Tahun 2014 realisasi persentase jumlah penduduk miskin sebesar 12,41% dari target sebesar 12%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 96,58% dari target RPJD tahun 2015, persentase jumlah penduduk miskin sebesar 12%.

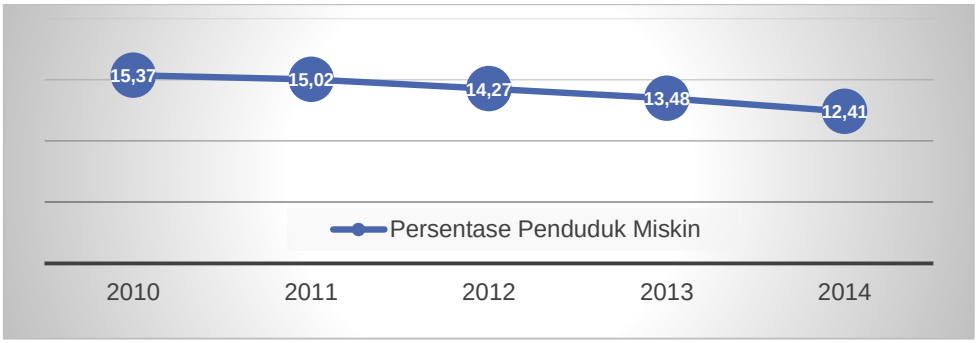

Gambar III.37 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010 – 2014

Data tahunan persentase jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 12,41% mendekati target yang ditetapkan. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebesar 113.863 jiwa, menurun sebesar 8.158 jiwa atau 1,07% dari tahun 2013 sebesar 122.021 jiwa.

Sedangkan berdasarkan jumlah keluarga miskin dan orang miskin, jumlah keluarga miskin tahun 2010 sebanyak 41.480 KK, menurun menjadi 38.056 KK pada tahun 2014, sementara jumlah orang miskin pada tahun 2010 sebanyak 129.614 jiwa, menurun menjadi 113.965 jiwa pada tahun 2014.

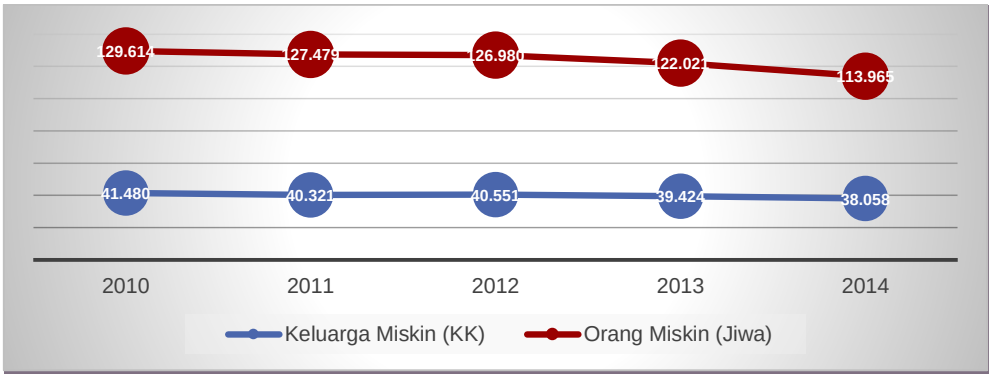

Gambar III.38 Perkembangan Jumlah Keluarga Miskin dan Orang Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2010 -2014

Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan. Hal ini bisa dipahami karena penduduk perdesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan

Sumber : TN2PK, 2015

Gambar III.39 Persentase Jiwa Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2014

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah jiwa miskin. Sejak tahun 2013, telah dikembangkan program dalam penanganan kemiskinan yaitu One Village One Product (OVOP) atau satu wilayah menghasilkan satu macam produk kerajinan andalan. Dari berkembangnya potensi wilayah tersebut, masyarakat dapat mengoptimalkan hasil kerajinannya selain sebagai ciri khas produk dari wilayahnya, hasil kerajinan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta mengentaskan kemiskinan. Program OVOP ini di Bantul dinamakan Produk Andalan Setempat (PAS).

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri. Berdasarkan data dari TNP2K, kecamatan yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi yaitu kecamatan Sedayu, Pundong dan Dlingo. Adanya perbedaan ini dikarenakan perbedaan indikator yang berbeda dalam penentuan kriteria miskin.

Gambar III.40 Aktivitas Masyarakat

Permasalahan :

1. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinannya.
2. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana produksi usaha ekonomi masyarakat miskin yang kurang memadai.

Solusi :

1. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berbasis wilayah dan ekonomi lokal.
2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan memanfaatkan potensi lokal.
3. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Dengan cara ini, upaya menjawab tingginya persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan bisa di lakukan dengan lebih efektif dengan manfaat berupa peningkatan pendapatan masyarakat

Guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, terus diupayakan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat sebagai berikut :

a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
b. Meningkatkan kinerja lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat kecamatan, desa dan pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin.
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan menyerap banyak tenaga kerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
14. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
15. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
16. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

11. Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh, desa siaga bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana

Tabel III.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa Tangguh	8	10,66	10,66	100,00	13,33	79,97

Sumber : BPBD, 2015

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai **Sangat Baik**. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh yang tercapai 10,66% dari target 10,66% atau nilai capaian 100%. Capaian ini menyumbangkan 79,97% dari target akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 13,33% desa tangguh. Desa tangguh yang terealisir sampai dengan tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo dan Mangunan. Sedangkan Sekolah Siaga Bencana sebanyak 3 (tiga) sekolah, yaitu SD Parangtritis, SMP 2 Imogiri dan SMA 1 Kretek.

Gambar III.41 Penumbuhan Cinta Lingkungan Sejak Dini

Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.

Wilayah Kabupaten Bantul memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berdampak hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Gelombang air pasang (*rob)* merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong.

Tabel III.22 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul

No	Jenis Bencana	Lokasi yang Berpotensi
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh kecamatan
2.	Kawasan rawan longsor	Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong, Pajangan
3.	Kawasan rawan banjir	Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret, Banguntapan, Kasihan, Bambanglipuro

No	Jenis Bencana	Lokasi yang Berpotensi
4.	Kawasan rawan gelombang pasang	Kretek, Srandakan, Sanden,
5.	Kawasan rawan angin ribut	Di seluruh kecamatan
6.	Kawasan rawan kebakaran	Di seluruh kecamatan
7.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

Sumber : BPBD, 2015

Kerawanan bencana bagi masyarakat Bantul terhadap frekuensi kejadian bencana selama tahun 2011 – 2014, terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.23 Frekuesi Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2014

No	Jenis Bencana	2011		2012		2013		2014	
		Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus
1	Banjir	3	6	2	41	5	19	0	0
2	Tanah longsor	12	70	12	29	19	39	13	38
3	Kebakaran	43	43	67	67	51	51	69	69
4	Gempa bumi	1	1	0	0	2	2	1	29
5	Angin ribut	9	194	9	132	7	118	9	185
6	Gelombang dan abrasi	1	1	0	0	3	146	0	0
7	Erosi sungai	1	2	0	0	0	0	9	9
8	Abrasi laut	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**77**	**324**	**116**	**312**	**100**	**405**	**140**	**377**

Sumber : BPBD, 2015

Catatan : Kejadian : peristiwa terjadi, Kasus : banyaknya titik terdampak per kejadian

Permasalahan :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
2. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul

Solusi :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

2. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi program prioritas dalam pengurangan resiko bencana.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;
b. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;
c. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan desa tangguh, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
d. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mantapnya penanggulangan bencana. Pada tahun 2014, sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

C. Pencapaian Kinerja Lainnya

1. Pencapaian Target MDGs

Analisis kondisi capaian MDGs akan menjadi dasar dalam menyusun target-target capaian pertahun dan capaian tujuan MDGs pada tahun 2015. Analisis capaian ini didasarkan pada indikator-indikator MDGs yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDGs didasarkan pada data-data sekunder seperti Susenas tahun 2009, SDKI tahun 2007, Sakernas 2009, Kemkes 2007, 2009 dan 2010 dan data-data yang tersedia di SKPD.

Capaian indikator MDGs Kabupaten Bantul sampai akhir tahun 2014 sebagian besar **sudah tercapai atau akan tercapai di akhir tahun 2015**. Indikator yang masih jauh dari target dan perlu perhatian serius adalah

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

   Data dari BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Kabupaten Bantul sampai akhir tahun 2013 masih 16,48% melebihi target MDGs 10,30%.

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

   Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar 6,67% menurun dibanding tahun 2013 sebesar 15,56%.

Kondisi pencapaian tujuan MDGs Kabupaten Bantul disajian pada lampiran IV.

2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 73,75 pada tahun 2009 hingga 76,01 pada tahun 2013. Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul naik sebesar 2,26 poin sedangkan dalam setahun terakhir meningkat sebesar 0,5 poin.

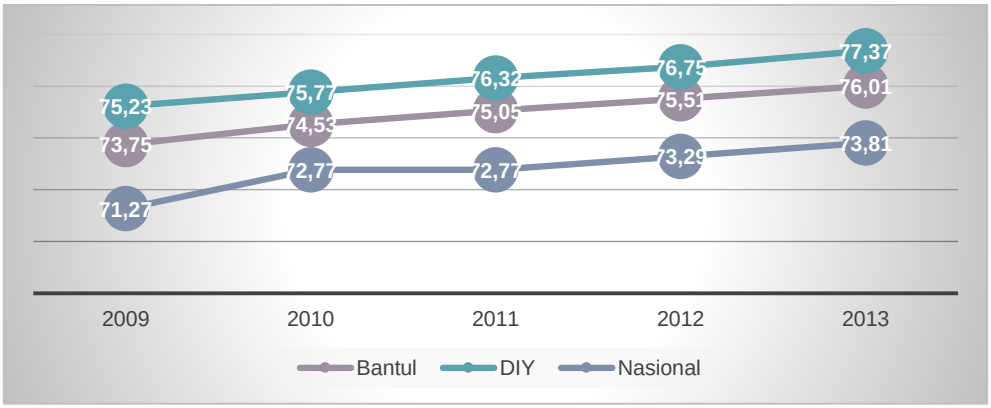

Gambar III.42 Perkembangan IPM Kabupaten Bantul Tahun 2009-2013

Trend dari tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa IPM baik di tingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan IPM DIY, Bantul masih berada di bawah DIY, namun jika dibandingkan dengan Nasional, Bantul masih lebih tinggi. Pada tahun 2009 IPM Bantul 73,75, meningkat menjadi 76,01 pada tahun 2013.

Tabel III.24 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2013

Indeks	Nilai			Pertumbuhan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Harapan Hidup	77,22	77,23	77,70	0,04	0,01	0,61
Pendidikan	80,64	81,35	81,91	0,45	0,88	0,69
Pendapatan	67,29	67,96	68,42	1,77	1,00	0,68
IPM	75,05	75,51	76,01	0,70	0,61	0,66

Sumber : BPS, 2013

3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupten bantul telah memenuhi target RPJMD dan sudah cukup tinggi, di tahun 2012 sebesar 68,52%. Namun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdapat selisi (gap) antara Indes Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2012 dengan persentase 72,69% . Hal ini menunjukkan IDG masih lebih rendah daripada IPG. Hal ini berarti masih perlu peningkatan prtisipasi perempuan dalam kehidupan berpolitik, dan kehidupan ekonomi, serta dalam hal pengambilan keputusan. Adanya selisih tersebut maka perlu adanya peningkatan indeks pemberdayaan gender. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi *stakeholder.*

Tabel III.25 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul

Tahun	Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Pekerja Profesional (%)	Perempuan Dalam Angkatan Kerja (%)	Perempuan Upah Pekerja Non Pertanian	IDG
2010	15,6	6,46	43,08	800,0	**63,83**
2011	15,6	7,62	34,82	800,0	**64,00**
2012	**15,5**		**334,5**		**68,52**

Sumber : BKKPP dan KB, 2014

Pencapaian indeks Pemberdayaan gender terus meningkat dri tahun ke tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2012. Pada Tahun 2010 dengan IDG 63,83%; meningkat di tahun 2011 yaitu 64,00% yang kemudian terus meningkat di Tahun 2012 menjadi 68,52%.

Pada tahun 2012 Kabupaten bantul dengn pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,51% dengan Indeks Pemberdayan Manusia (IDG) sebesar 68,51% adalah termasuk IPM cukup tinggi dan IDG yang cukup tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berada pada kondisi yang sudah baik yang diikuti pula dengan pemberdayaan perempuan yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil dari pembangunan manusia yang sudah baik sudah dapat dimanfaatkan oleh penduduknya untuk berbuat yang maksimal dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan.

D. Akuntabilitas Anggaran

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2014 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.1.733.247.144.497,78 dan belanja sebesar Rp.1.901.355.826.511,47 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.168.108.682.031,69 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2014 untuk pendapatan sebesar Rp.1.813.917.142.695,75 realisasi belanja Rp.1.700.351.278.809,56 dan surplus realisasi belanja Rp.113.565.863.886,19 dan terdapat surplus pembiayaan Rp.169.854.018.712,57 sehingga terdapat Silpa Rp.283.419.882.598,76.

Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.26 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014*

	Uraian	Jumlah TA 2014		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A	Pendapatan	1.733.247.144.497,78	1.813.917.142.695,75	80.669.998.197,97	104,65
	Pendapatan asli daerah	288.038.728.992,34	357.411.062.723,21	69.372.333.730,87	124,08
	Dana perimbangan	1.042.578.600.994,00	1.036.632.898.871,00	(5.945.702.123,00)	99,43
	Lain-lain pendapatan yang sah	402.629.814.511,44	419.873.181.101,54	17.243.366.590,10	104,28
B	Belanja	1.901.355.826.511,47	1.700.351.278.809,56	(201.004.547.701,91)	89,43
	Belanja tidak langsung	1.103.697.182.625,47	978.483.338.793,56	(125.213.843.831,91)	88,66
	Belanja langsung	797.658.643.886,00	721.867.940.016,00	(75.790.703.870,00)	90,50
C	Pembiayaan				
	Penerimaan daerah	211.628.963.013,69	213.163.271.394,69	1.534.308.381,00	100,72
	Pengeluaran daerah	43.520.281.000,00	43.309.252.682,12	(211.028.317,88)	99,52
	Surplus (defisit) pembiayaan	168.108.682.013,69	169.854.018.712,57	1.745.336.698,88	101,04
	Selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	283.419.882.598,76	283.419.882.598,76	

Sumber : DPPKAD, 2015 * : unaudited

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.1.901.355.826.511,47 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.27 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tak Langsung	1.103.697.182.625,47	58,05
2	Belanja Langsung	797.658.643.886,00	41,95
	Jumlah	**1.901.355.826.511,47**	**100,00**

Sumber : DPPKAD, 2015

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.28 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	16.555.822.335,00	2,08
2	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	6.681.412.540,00	0,84
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6.929.656.650,00	0,87
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	153.897.559.032,00	19,29
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	78.009.596.466,00	9,78
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	133.541.625.200,00	16,74
7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	12.496.486.455,00	1,57
8	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	5.076.253.300,00	0,64
9	Menurunnya tingkat pengangguran	14.352.993.825,00	1,80
10	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	57.811.273.278,00	7,25
11	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	1.357.927.000,00	0,17
Jumlah		**486.710.606.081,00**	**61,02**
Belanja Langsung Pendukung		**310.948.037.805,00**	**38,98**
Total Belanja Langsung		**797.658.643.886,00**	**100,00**

Sumber : Bagian Tapem, 2015, data diolah

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggatan untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.486.710.606.081,00 atau sebesar 61,02% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.310.948.037.805,00 atau sebesar 38,98% dari total belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan besaran anggaran 19,29% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar adalah sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan, yaitu sebesar 16,74%. Sementara itu, sasaan dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana sebesar 0,17% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,50%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,71%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Gizi Guruk sebesar 99,99%. Anggaran pada IKU ini efektif mendukung akuntabilitas kinerja. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 51,57%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata menyerap anggaran paling besar yaitu 98,71% dari target. Anggaran pada sasaran ini efektif mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menyerap anggaran terkecil yaitu 51,57% dari target, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel III.29 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B (66)	B (65,03)	98,53	6.567.986.335	5.932.541.319	90,33
		Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (3,1)	Sangat Tinggi (3,177)	102,47	9.987.836.000	6.752.509.732	67,61
2	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100,00	6.681.412.540	5.916.199.070	88,55
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,65	76,9	100,33	6.929.656.650	3.573.549.670	51,57
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	75/100.000 KH	104,7/100.000 KH	60,40	1.030.473.375	961.606.980	93,32
		Angka Kematian Bayi	7,5/1.000 KH	8,75/1.000 KH	83,33	6.299.805.290	6.083.661.510	96,57
		Persentase Gizi Buruk	0,45	0,38	115,56	3.149.382.400	3.149.104.300	99,99
		Usia Harapan Hidup	71,38	71,62	100,34	143.417.897.967	127.753.147.114	89,08
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	92,75	92,81	100,06	27.444.026.508	23.535.482.454	85,76
		Rata-rata lama sekolah	9,1	9,02	99,12	50.565.569.958	43.302.664.608	85,64

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,74	5,44	94,77	77.324.261.600	75.948.587.460	98,22
		Indeks Gini	0,2304	0,2441	94,05	56.217.363.600	54.915.576.315	97,68
7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi	138,64	139,28	100,46	3.921.419.500	3.816.868.488	97,33
		Tingkat ketersediaan Protein	133,33	133,88	100,41	8.575.066.955	8.277.027.212	96,52
8	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	5	6,73	134,60	5.076.253.300	5.010.685.565	98,71
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran	4,9	4,3	112,24	14.352.993.825	13.743.671.739	95,75
10	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	12	12,41	96,58	57.811.273.278	56.079.381.010	97,00
11	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh	10,66	10,66	100,00	1.357.927.000	1.286.093.194	94,71
Jumlah						486.710.606.081	443.871.212.290	91,64
Belanja Langsung Pendukung						310.948.037.805	275.829.582.276	88,71
Total Belanja Langsung						797.658.643.886	721.867.940.016	90,50

Sumber : Bagian Tapem, 2015, data diolah

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 9,50%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 8,36%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11,29%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 48,43%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Gizi Buruk sebesar 0,01%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik efisiensi anggarannya paling besar yaitu 48,43% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1,29% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.30 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

No	Indikator Kinerja	Anggaran			Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Rp.	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	6.567.986.335	5.932.541.319	90,33	635.445.016	9,67
2	Nilai EKPPD	9.987.836.000	6.752.509.732	67,61	3.235.326.268	32,39
3	Opini pemeriksaan BPK	6.681.412.540	5.916.199.070	88,55	765.213.470	11,45
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6.929.656.650	3.573.549.670	51,57	3.356.106.980	48,43
5	Angka Kematian Ibu	1.030.473.375	961.606.980	93,32	68.866.395	6,68
6	Angka Kematian Bayi	6.299.805.290	6.083.661.510	96,57	216.143.780	3,43
7	Persentase Gizi Buruk	3.149.382.400	3.149.104.300	99,99	278.100	0,01
8	Usia Harapan Hidup	143.417.897.967	127.753.147.114	89,08	15.664.750.853	10,92
9	Angka melek huruf	27.444.026.508	23.535.482.454	85,76	3.908.544.054	14,24
10	Rata-rata lama sekolah	50.565.569.958	43.302.664.608	85,64	7.262.905.350	14,36
11	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	77.324.261.600	75.948.587.460	98,22	1.375.674.140	1,78
12	Indeks Gini	56.217.363.600	54.915.576.315	97,68	1.301.787.285	2,32

No	Indikator Kinerja	Anggaran			Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Rp.	%
13	Tingkat Ketersediaan Energi	3.921.419.500	3.816.868.488	97,33	104.551.012	2,67
14	Tingkat ketersediaan Protein	8.575.066.955	8.277.027.212	96,52	298.039.743	3,48
15	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	5.076.253.300	5.010.685.565	98,71	65.567.735	1,29
16	Angka pengangguran	14.352.993.825	13.743.671.739	95,75	609.322.086	4,25
17	Persentase jumlah penduduk miskin	57.811.273.278	56.079.381.010	97,00	1.731.892.268	3,00
18	Persentase Desa Tangguh	1.357.927.000	1.286.093.194	94,71	71.833.806	5,29
Jumlah		**486.710.606.081**	**446.038.357.740**	**91,64**	**40.672.248.341**	**8,36**
Belanja Langsung Pendukung		**310.948.037.805**	**275.829.582.276**	**88,71**	**35.118.455.529**	**11,29**
Total Belanja Langsung		**797.658.643.886**	**721.867.940.016**	**90,50**	**75.790.703.870**	**9,50**

Sumber : Bagian Tapem, 2015, data diolah

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2014, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 11 (sebelas) sasaran, 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 98,77% atau kinerja kriteria **Sangat Baik.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 16 (enam belas) IKU atau sebanyak 88,89% kriteria **Sangat Baik**, 1 (satu) IKU atau 5,56% kriteria **Tinggi** dan 1 (satu) IKU atau 5,56% kriteria **Rendah**. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Lampiran I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2014

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 12 September 2014
2. Pemerintah Kabupaten Bantul, Predikat “B” atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 8 Desember 2014
3. Penghargaan Wahana Tata Nugraha atas keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan di Bidang lalu lintas dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 10 September 2014
4. Penghargaan Adikarya Bhakti Praja 2014 dengan Predikat Juara I dalam rangka Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional yang diraih Desa Panggungharjo, Sewon Bantul, oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 16 Agustus 2014
5. Penghargaan KUA Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014 diraih oleh KUA Kecamatan Piyungan, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, 17 Agustus 2014
6. Puskesmas Kasihan I sebagai Puskesmas Pembina UKS Kategori Kinerja Terbaik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 13 Agustus 2014
7. Puskesmas Kasihan I sebagai Juara Nasional Kelas Kelompok Pendukung (Kekep) Ibu Hamil dan Penanggulangan Angka Kematian Ibu,dari Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, 15 Maret 2014
8. RS. Nur Hidayah meraih penghargaan Tingkat Nasional KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, dari BKKBN Republik Indonesia, 14 Juni 2014
9. SD Ngrukeman Kasihan, sebagai Sekolah Sehat Tingkat Nasional tingkat SD
10. SMA 2 Bantul, sebagai Juara II Lomba Sekolah Sehat Katergori Kinerja Terbaik
11. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul, sebagai Kinerja Terbaik Peringkat III Tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Sub Bidang Sumber Daya Air

12. Juara Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, November 2014
13. “Manggala Karya Bakti Husada Kartika”, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atas jasa Luar Biasa dalam Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat untuk Hidup Sehat, 21 November 2014
14. Adiwiyata Nasional Tahun 2014, Sekolah Peduli dan Berbudaya Nasional SD Kanisius Sorowajan Banguntapan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Desember 2014
15. Adiwiyata Nasional Tahun 2014 Sekolah Peduli dan Berbudaya Nasional SMA I Banguntapan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Desember 2014
16. Penghargaan Runner Up 2 kategori Overall Society Indonesia Digital Society Award 2014, dari Kementerian Komunikasi & Informasi (Kominfo) Republik Indonesia, 8 Mei 2014
17. Piagam Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”, dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diberiikan kepada Dra. Ani Widayani, Kepala Desa Sumbermulyo Bambanglipuro, Desember 2014
18. Piagam Penghargaan “Matri Tani Berprestasi Tingkat Nasional”dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diberikan kepada Suhartini, STP Mantri Tani Kecamatan Bambanglipuro, 6 November 2014
19. Juara I Tingkat Nasional SKB Berprestasi dalam rangka Hari Aksara Internasional ke 49 Tahun 2014, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 20 September 2014
20. Juara II Lomba Karya Nyata Kepala SKB dalam rangka Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Nasional diraih oleh RR. Dwi Suwarniningsih, S.Pd, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2014
21. Juara II Lomba Karya Nyata Pengelola TBM dalam Rangka Apresiasi PTK PAUDNI tingkat Nasional diraih oleh Rairuzul Mumtaz
22. Juara II Lomba Karya Nyata Instruktur Tata Busana dalam rangka Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional diraih oleh Dra. Valentina Poniyem, M.Pd, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2014
23. Juara II Lomba Karya Tulis Pamong Belajar dalam rangka Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Nasional diraih oleh Agus Hari Prabowo, M.Pd, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2014

Lampiran II

Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul

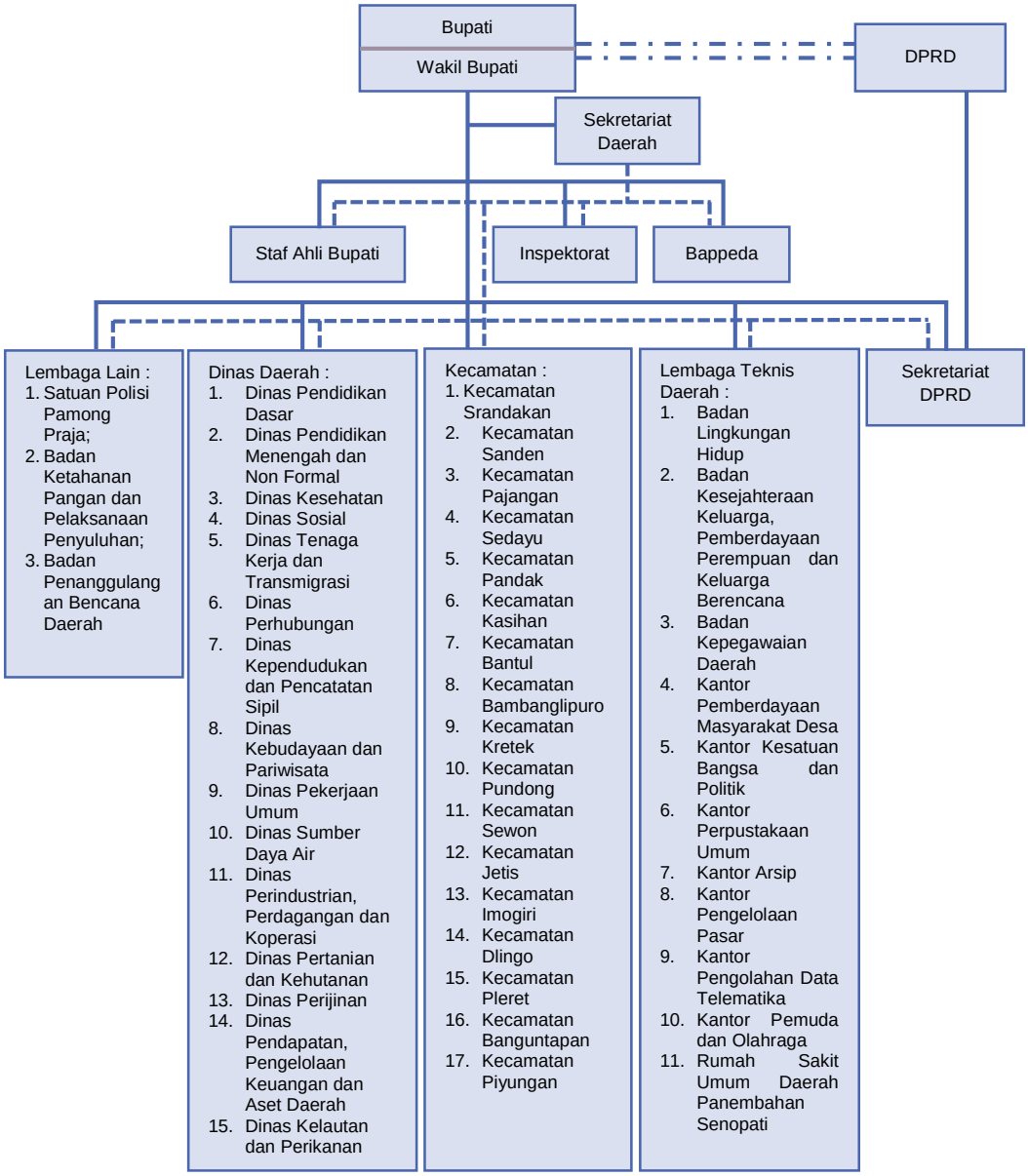

Lampiran III

Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 (Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013 *)		2014**)	
		PDRB (juta Rp)	(%)	PDRB (juta Rp)	(%)	PDRB (juta Rp)	(%)	PDRB (juta Rp)	(%)	PDRB (juta Rp)	(%)
1	Pertanian	1.834.746	20,21	2.006.932	19,88	2.239.466	19,92	2.459.169	19,32	2.660,476	18,64
2	Pertambangan dan Penggalian	85.446	0,94	94.174	0,93	98.745	0,88	105.798	0,83	116.730	0,82
3	Industri Pengolahan	1.750.151	19,28	1.991.819	19,73	2.142.812	19,06	2.426.154	19,06	2.660.171	18,63
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	108.148	1,19	114.736	1,14	124.112	1,10	137.628	1,08	154.217	1,08
5	Bangunan	1.104.073	12,16	1.206.859	11,95	1.333.501	11,86	1.517.928	11,92	1.749.691	12,26
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.602.662	17,66	1.799.008	17,82	2.055.059	18,28	2.361.458	18,55	2.652.438	18,58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	623.940	6,87	691.451	6,85	770.174	6,85	884.323	6,95	1.001.589	7,02
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	615.172	6,78	698.763	6,92	787.194	7,00	899.379	7,07	1.049.272	7,35
9	Jasa-jasa	1.352.064	14,90	1.493.604	14,79	1.691.088	15.04	1.938.004	15,22	2.230.976	15,63
PDRB		**9.076.401**	**100,00**	**10.097.345**	**100,00**	**11.242.151**	**100,00**	**12.729.840**	**100,00**	**14.275.559**	**100,00**

Sumber : BPS, 2015

**) Angka sangat sementara

Lampiran IV

Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun 2014

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN														
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015														
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	20,60% (1990)	5,90% (2008)	5,90% (2008)	10,30%	●	Bank Dunia dan BPS							
1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	15,10% (1990)	13,33% (2010)	12,49% (2011)	7,55%	▼	BPS, Susenas	16,09% (2010)	16,97% (2012)	16,48%	16,48 %	10,3%	▼	BPS
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,70% (1990)	2,21% (2010)	2,08% (2011)	Berkurang	►	BPS, Susenas	2,74 (2010)	2,78% (2012)	2,63% (2013)	2,63% (2013)	menurun	►	BPS
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda														
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,52% (1990)	2,24% (2009)	5,04% (2011)	-		PDB Nasional dan Sakernas	8,46% (2010)	9% (2012)	9,83% (2013)	9,83% (2013)	2,2%	●	BPS

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	65% (1990)	62% (2009)	63,85% (2011)	-		BPS, Sakernas	94,76 (2010)	96,4% (2012)	96,64% (2013)	96,64 % (2013)	meningkat	●	BPS
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	71% (1990)	64% (2009)	44,24% (2011)	Menurun	►		34,17% (2010)	25,03% (2012)	27,57% (2013)	27,57 % (2013)	menurun	►	BPS
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015														
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	31,00% (1989)*	18,4% (2007)**	17,90% (2010)**	15,50%	►	*BPS, Susenas **Kemenkes Riskesdas							
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	7,20% (1989)*	5,4% (2007)**	4,90% (2010)**	3,60%	►		0,58% (2010)	0,42% (2013)		0,38%	< 1%	●	Dinkes
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	23,80% (1989)*	13,0% (2007)**	13,00% (2010)**	11,90%	►		12% (2010)	9,71% (2013)		8,15%	11,9%	●	Dinkes
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:					▼	BPS, Susenas							
	- 1400 Kkal/kapita/hari	17,00% (1990)	14,47% (2009)	14,65 % (2011)	8,50%			15,56% (2011)	13,90 (2012)	10,71% (2013)	10,71 % (2013)	8,5%	►	BPS

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
	- 2000 Kkal/kapita/hari	64,21% (1990)	61,86% (2009)	60,03 %(2011)	35,32%			74,36% (2011)	66,07 (2012)	64,62% (2013)	64,62 % (2013)	35,32%	▶	BPS
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA														
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar														
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	88,70% (1992)*	95,23% (2009)*	95,55 %(2011)**	100,00%	▶	*BPS, Susenas **Kemdikbud	91,03%	93,8% (2013)	93,80%	93,94 %	100%	▶	Dikdas
2.2.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	62,00% (1990)	93,00% (2008)**	96,58 % (2011)	100,00%	▶	Kemdikbud	99,98% (2010)	99,99% (2013)	100%	100%	100%	●	Dikdas
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	96,60% (1990)	99,47% (2009) Female: 99,40% Male: 99,55%	98,78 % (2011) Perempuan: 98,75 % Laki-laki: 98,80 %	100,00%	▶	BPS, Susenas	99,55% (2011)	99,22 (2012)	100%	100%	100%	●	BPS
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015														
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi													

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
	-Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100,27 % (1993)	99,73 (2009)	98,80% (2011)	100,00	▶	BPS, Susenas	104,09 % (2010)	98,55% (2012)	100,75 % (2013)	100,75 % (2013)	100%	●	BPS, Susenas
	-Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	99,86% (1993)	101,99 (2009)	103,45 % (2011)	100,00	▶	BPS, Susenas	119,77 % (2010)	121,11% (2012)	99,6% (2013)	99,6% (2013)	100%	●	
	-Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	93,67% (1993)	96,16 (2009)	101,40 % (2011)	100,00	●	BPS, Susenas	107,90 %	90,00%	89,81% (2013)	89,81 % (2013)	100%	●	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	74,06% (1993)	102,95 (2009)	97,82% (2011)	100,00	▶	BPS, Susenas	90,16%	140,32%			Tidak ada data		
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98,44% (1993)	99,85 (2009)	99,95% (2011)	100,00	●	BPS, Susenas	100,91 % (2011)	101,52% (2012)	100.00 (2013	100.00 (2013	100%	●	
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	29,24% (1990)	33,45% (2009)	36,67% (2011)	Meningkat	▶	BPS, Sakernas	42,69% (2011)	44,07% (2012)	43,68% (2013)	43,68 % (2013)	meningkat	●	
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12,50% (1990)	17,90% (2009)	18,40% (2011)	Meningkat	▶	KPU	15,56% (2010)	15,56% (2013)	6,67%	6,67%	meningkat	▼	Setwan
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK														
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015														
4.1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	97 (1991)	44 (2007)	44 (2007)	32	▶	BPS, SDKI 1991, 2007;	1,7 per 1000 KH (2010)	1,9 per 1000 KH (2013)		0,74 per 1000 KH	32	●	Dinkes

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	68 (1991)	34 (2007)	34 (2007)	23	►	*BPS, Susenas 2011	9,8 per 1000 KH (2010)	9,39 per 1000 KH (2013)		8,75 per 1000 KH	23	●	Dinkes
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	32 (1991)	19 (2007)	19 (2007)	Menurun	►		7,3 per 1000 KH (2010)	6,48 per 1000 KH (2013)		5,6 per 1000 KH	menurun	●	Dinkes
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	44,50% (1991)	67,0% (2007)	87,30% (2011)*	Meningkat	►		97,3% (2010)	95,2% (2013)		96,06 %	meningkat	►	Dinkes
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU														
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015														
5.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	390 (1991)	228 (2007)	228 (2007)	102	▼	BPS, SDKI	82,07 per 100.000 KH (2010)	96,83 per 100.000 KH (2013)		104,7 per 100.000 KH (2014)	102 per 100.000 KH	►	Dinkes
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	40,70% (1992)	77,34% (2009)	81,25% (2011)	Meningkat	►	BPS, Susenas	99,5 % (2010)	99,96% (2013)		99,98 % (2014)	Meningkat	●	Dinkes
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015														
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara	49,70% (1991)	61,4% (2007)	61,34% (2011)*	Meningkat	►	BPS, SDKI 1991, 2007 *BPS, Susenas 2011	79% (2010)	81% (2013)		79,87 % (2014)	Meningkat	●	BKKPPKB
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan	47,10% (1991)	57,4% (2007)	60,42% (2011)*	Meningkat	►		79% (2010)			79,87 %	Meningkat	●	BKKPPKB

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
	menikah usia 15-49 tahun, cara modern						**KemenkesRiskesdas 2010							
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	67 (1991)	35 (2007)	35 (2007)	Menurun	▶		-	4,18 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun		0,53	Menurun	●	Dinkes
5.5	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)													
	- 1 kunjungan:	75,00%	93,3%	92,70% (2010)**	Meningkat	▶		100% (2010)	100% (2013)		100% (2014)	Meningkat	●	Dinkes
	- 4 kunjungan:	56,00% (1991)	81,5% (2007)	61,40% (2010)**		▶		90,2% (2010)	91,67% (2013)		92,02 % (2014)	Meningkat	●	Dinkes
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	12,70% (1991)	9,10% (2007)	9,10% (2007)	Menurun	▶		8,69% (2010)	6,25% (2013)		6,17%	Menurun	▶	BKKPPKB
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA														
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015														
6.1	Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi	-	0,2% (2009)	0,30% (2011)	Menurun	▼	Kemenkes 2011	0,07% (2010)	0,05% (2013)		0,05%	Menurun	▶	Dinkes
6.2	Penggunaan kondom pada		Perempuan : 10,3%	Perempuan :	Meningkat	▼	*BPS,	20% (2010)	70% (2013)		100%	Meningkat	●	Dinkes

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
	hubungan seks berisiko tinggi terakhir	12,80% (2002/03)*		35,00% (2011)**			SKRRI 2002/2003 **STBP, Kemenkes 2011							
			Laki-laki: 18,4% (2007)	Laki-laki: 14,00% (2011)**		▼								
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	-	**Menikah: Perempuan:** 9,5%(2007) **Laki-laki:** 14,7% (2007)	11,40% (2010)	Meningkat	▼	Kemenkes, Riskesdas 2010	30% (2010)	50% (2013)		100%	Meningkat	●	Dinkes
			Belum Menikah: Perempuan: 2,6% **Laki-laki:** 1,4% (2007)											
Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDs bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010														
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	-	38,4% (2009)	84,10% (2011)	Meningkat	►	Kemenkes, 2011	100% (2010)	100% (2013)		100%	100%	●	Dinkes

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015														
6.6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria							0,02 per 1000 penduduk	0,005 per 1000 penduduk		0,00063 per 1000 penduduk	Menurun	●	Dinkes
66.a	Angka kejadian Malaria (per 1,000 penduduk):	4,68 (1990)	1,85 (2009)	1,75% (2010)	Menurun	►	Kemenkes, 2010						●	
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	-	3,3% Rural: 4,5% Urban : 1,6% (2007)*	16,50% (2010) Rural: 13.5% Urban: 11.4%	Meningkat	►	Kemenkes, Riskesdas 2010	-	-	-	-	-	Kab. Bantul sudah 0 malaria sehingga tidak ada program ini	Dinkes
6.8	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	-	34,70% (2010)	34,70% (2010)			Kemenkes, Riskesdas 2010						●	Dinkes
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015														
6.9	Angka kejadian, prevalensi dan													

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
	tingkat kematian akibat Tuberkulosis													
6.9a	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)	343 (1990)	228 (2009)	189 (2011)	Dihentikan, mulai berkurang	●	Laporan TB Global WHO, 2011	43 (2010)	25 (2011)		46,35		►	Dinkes
6.9b	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	443 (1990)	244 (2009)	289 (2011)		●		43 (2010)	25 (2011)		23,6		●	Dinkes
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	92 (1990)	39 (2009)	27 (2011)		●		4,08%(2010)	10,53% (2011		1,2%		●	Dinkes
6.10	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS					●								
6.10 a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	20,00% (2000)*	73,1% (2009)**	83.48% (2011)**	70,00%	●	*Laporan TB Global WHO **Laporan Kemenkes, 2011	84,8% (2010)	90,35% (2011)		100%		●	Dinkes
6.10 b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87,00% (2000)*	91,0% (2009)**	90,30% (2011)**	85,00%	●					87,2%		●	Dinkes

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP														
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang														
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	59,97% (1990)	52,43% (2008)	52,52% (2010)	Meningkat	▼	Kementerian Kehutanan	62%	65%		65%	Meningkat	●	Bappeda
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO_2)	1.377.983 Gg CO2e (2000)	1.711.626 Gg CO_2e (2008)	1.791.372 Gg CO2e (2005)	Berkurang 26% pada 2020	▼	Kementerian Lingkungan Hidup				n.a			
7.2a.	Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)	2,64 BOE (1991)	4,3 BOE (2008)	4,95 BOE (2010)	Menurun dari kondisi BAU 6,99		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral				n.a			
7.2b.	Intensitas Energi	5,28 SBM/ USD 1,000 (1990)	2,1 SBM/ USD 1,000 (2008)	4,61 SBM/USD 1,000 (2010)	Menurun						n.a			
7.2c.	Elastisitas Energi	0,98 (1991)	1,6 (2008)	1,6 (2010)	Menurun						n.a			
7.2d.	Bauran energi untuk energi terbarukan	3,50% (2000)	3,45% (2008)	5,00% (2010)	-									
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton	8.332,7 metric tons (1992)	0 CFCs (2009)	0 CFC, Halon, CTC, TCA,	0 CFCs dengan mengura	►	Kementerian Lingkungan Hidup				n.a			

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
				metil bromida 6.689,21 metrik ton HCFC (2010)	ngi HCFCs									
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	66,08% (1998)	91,83% (2008)	96,86% (2011)	tidak melebihi batas	►	Kementerian Kelautan & Perikanan				n.a			
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	26,40% (1990)	26,40% (2008)	27,54% (2010)	Meningkat	►	Kementerian Kehutanan				n.a			
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,14% (1990)*	4,35% (2009)**	4,97% (2011)**	Meningkat	►	*Kementerian Kehutanan ** Kementerian Kelautan & Perikanan				n.a			

Indikator		NASIONAL						KABUPATEN						
		Acuan Dasar	Data Peta Jalan MDGs	Data Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber	Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Data Terbaru Saat Ini*		Target MDGs 2015	Status	Sumber
										Semester 1	Semester 2			
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak hingga tahun 2015														
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	37,73% (1993)	47,71%(2009)	42,76% (2011)	68,87%	▼	BPS, Susenas	82,7%			97,6%		●	Dinkes
7.8a	Perkotaan	50,58% (1993)	49,82% (2009)	40,52% (2011)	75,29%	▼								
7.8b	Perdesaan	31,61% (1993)	45,72% (2009)	44,96% (2011)	65,81%	▼								
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	24,81% (1993)	51,19% (2009)	55,60% (2011)	62,41%	▼		67,8%	65,9%		82,11 %		●	Dinkes
7.9a	Perkotaan	53,64% (1993)	69,51% (2009)	72,54% (2011)	76,82%	►								
7.9b	Perdesaan	11,10% (1993)	33,96% (2009)	38,97% (2011)	55,55%	▼								
Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020														
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	20,75% (1993)	12,12% (2009)	12,57% (2011)	6% (2020)	▼	BPS, Susenas	2,57% (2011)	1,58 (2012)	1,26% (2013)	1,26% (2013)	Menurun	●	BPS

Sumber : Bappeda, 2015

Keterangan :

– Status **:** ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

– Data pencapaian indikator MDGs yang bersumber dari **BPS, Susenas**pada:
  - **Semester 1** : menggunakan data bulan **September pada tahun sebelumnya**
  - **Semester 2** : menggunakan data bulan **Maret pada tahun berjalan**

– Data pencapaian indikator MDGs yang bersumber dari **BPS, Sakernas** pada:
  - **Semester 1** : menggunakan data bulan **Agustus pada tahun sebelumnya**
  - **Semester 2** : menggunakan data bulan **Februari pada tahun berjalan**